



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI AKTIVITAS DAN PELAPORAN CSR PADA  
PT. AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA (ANCRI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**ADLIN HAFIDZA  
0806434126**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : ADLIN HAFIDZA**

**NPM : 0806434126**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 30 Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Adlin Hafidza  
NPM : 0806434126  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Evaluasi Aktivitas dan Pelaporan CSR pada PT.  
AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA  
(ANCRI)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Chaerul D. Djakman ( )  
Penguji : Dr. Silvia Veronica NPS ( )  
Penguji : Rafika Yuniasih, MSM ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 30 Juli 2010

Mengetahui,  
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar pada program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Lindawati Gani, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Universitas Indonesia karena berkat kebijaksanaannya dateline tesis diperpanjang sampai dengan 25 Juni 2010 dan kepada seluruh dosen pengajar;
- (2) Bapak Chaerul D. Djakman selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Ibu Rafika Yuniasih selaku dosen pembimbing akademis yang telah bersedia memberikan saran-saran, masukan, dan nasihat yang bermanfaat sehingga tesis ini bisa saya selesaikan dengan penuh rasa optimis;
- (4) Jajaran Staf Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mbak Debo, Mas Imam, Mas Bambang, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama ini;
- (5) Ibunda Dewi dan Ananda Hanif tercinta serta keluarga besar Malik yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral serta doa yang tidak habis-habisnya;
- (6) Suami, Norist, dan anak-anak tercinta yang penuh pengertian dan kesabaran mendampingi di masa-masa tersulit sekalipun;
- (7) Sahabat-sahabat dan rekan-rekan kerja yang bersedia memberikan dorongan dan membantu pekerjaan yang terkadang terbengkalai;
- (8) Teman-teman MAKSI UI khususnya kelas G/2008-1, Mba Sarah, Okvi, Nindra, Ao, Whikky, Rio, Patpat, Olive, Tante De, Om Tommy, Key, Mbak

Cici, Tante Tin, Pak Win, Mba Yunita, Pak Surya, Mas Nanto, Pak Renold, Pak Thoriq, Pak Narta, Mas Oi, Shirin, dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu;

(9) Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Jakarta, 30 Juli 2010

Adlin Hafidza

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adlin Hafidza  
NPM : 0806434126  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Thesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Aktivitas dan Pelaporan CSR pada PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2010

Yang menyatakan

(Adlin Hafidza)

## ABSTRAK

Nama : Adlin Hafidza  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Evaluasi Aktivitas dan Pelaporan CSR pada PT. AKZO  
NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA (ANCRI)

Tesis ini membahas tentang aktivitas dan pelaporan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI). Perlu diketahui bahwa CSR dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR muncul diiringi dengan adanya kesadaran akan adanya dampak negatif dari usaha yang dilakukan.

ANCRI sebagai bagian dari sebuah perusahaan internasional selama ini menjalankan program CSR dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu bentuk CSR yang dilakukan adalah berupa *community development* yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperbaiki kondisi lingkungan dengan berlandaskan pada MDG (*Millenium Development Goals*). Untuk mencapai hasil yang optimal dari *community development* yang dilakukan, maka dibutuhkan *sustainability* di dalam pelaksanaannya.

Pelaporan CSR yang dibuat oleh ANCRI selama ini berbentuk narasi dan belum mengikuti standar yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun penyebab dari tidak dibuatnya pelaporan yang sesuai dengan standar umum adalah karena masih terkonsentrasinya segala aktivitas, pendanaan, serta pelaporan di Akzo Nobel Global, Belanda. Selain itu, ANCRI sepenuhnya masih dimiliki oleh Akzo Nobel Global yang sahamnya tidak diperjualbelikan dan dimiliki oleh pihak di Indonesia.

Kata kunci:

*Corporate Social Responsibility, community development,* dan Pelaporan CSR

## ABSTRACT

Name : Adlin Hafidza  
Study program : Magister Accounting  
Title : Evaluating CSR Activities and Reporting in PT. AKZO  
NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA (ANCRI)

This thesis discusses about CSR (Corporate Social Responsibility) activities and reporting in PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI). CSR performed as a form of corporate responsibility toward communities and environments. CSR appears accompanied by the awareness of the negative impact cause by the activities in the company.

As part of an international company, ANCRI has done CSR programs based on the awareness of corporate responsibility, inside and outside, towards community and environment. One of CSR's forms is community development that aims to develop the living standard of a community and improve environmental conditions based on the MDGs (Millenium Development Goals). To reach optimum result, sustainability in the execution of community development is needed.

All these years, ANCRI use narrative form to make CSR reporting and not yet following the standards commonly used by companies in Indonesia. The reason for not make the CSR report as the standard commonly used is because all the activities, funding, and reporting in ANCRI still concentrated in the Akzo Nobel Global in Netherlands. Another reason for not making the report as the standard is because ANCRI's shares are fully owned by Akzo Nobel Global and never been traded in Indonesia.

Keywords :

Corporate Social Responsibility, community development, and CSR reporting



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Penelitian	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b>	
2.1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	9
2.1.1. Definisi CSR	9
2.1.2. Sejarah CSR	11
2.1.3. Penerapan CSR	15
2.1.4. Mekanisme Penerapan Program CSR	20
2.1.5. CSR dan Strategi Bisnis	21
2.1.6. Manfaat CSR	23
2.1.7. Pelaporan dan Pengungkapan Program CSR di Indonesia	24
2.2. <i>Community Development</i>	26
2.3. <i>Millenium Development Goals (MDG)</i>	28
<b>BAB GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
3.1. Profil Perusahaan	32
3.1.1. Sejarah Singkat Akzo Nobel	32

3.1.2.	Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI)	33
3.2.	Nilai-Nilai Perusahaan	34
3.3.	Produk	37
3.4.	Struktur Organisasi	39
3.5.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	41
3.6.	ANCRI dan INA ( <i>Indonesian Netherlands Assocoations</i> )	43
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Makna CSR Bagi Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI)	45
4.2.	Aktivitas CSR Berupa <i>community Development</i> di Merunda	49
4.2.1.	Kondisi Umum Merunda	50
4.2.2.	Perumusan Program	51
4.2.3.	Pelaksanaan Program	54
4.2.4.	Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya	56
4.2.5.	Manfaat yang Dirasakan	58
4.2.6.	Kondisi Marunda Paska <i>Community Development</i> ANCRI	59
4.3.	Kesesuaian Aktivitas CSR di ANCRI dengan Program MDG ( <i>Millenium Development Goals</i> )	61
4.4.	Pelaporan CSR di ANCRI	66
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b>		
5.1.	Kesimpulan	68
5.2.	Saran	70
5.3.	Kelemahan Penelitian	71
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		72
<b>LAMPIRAN</b>		

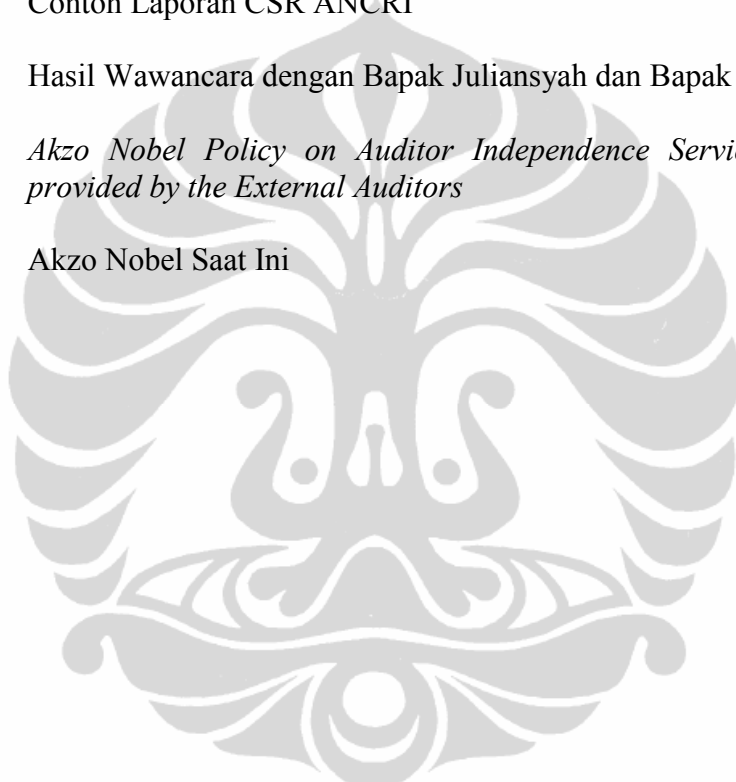
## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. The Triple Bottom Line	2
Gambar 2.1. <i>Environmental and The Millenium Developmet Goals</i>	30
Gambar 3.4. Posisi ANCRI di dalam Akzo Nobel Global	40
Gambar 4.1. <i>When Fishery Rhymes With Poverty</i>	62
Gambar 4.2. Keterkaitan antara Tujuan-Tujuan MDG	65



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Petikan Keputusan Menpora tentang Pemberian Penghargaan kepada Bapak Suaeb Mahbub sebagai Pemuda Pelopor tahun 2009
- Lampiran 2 Permohonan Pembinaan Sebagai Solusi atas Kerugian Akibat Perda no.08 tahun 2007
- Lampiran 3 Contoh Laporan CSR ANCRI
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Bapak Juliansyah dan Bapak Sri Aditia
- Lampiran 5 *Akzo Nobel Policy on Auditor Independence Services to be provided by the External Auditors*
- Lampiran 6 Akzo Nobel Saat Ini



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Wacana mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir dengan dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa keberadaan sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Perusahaan sebagai institusi sosial pada dasarnya juga memiliki ketergantungan hidup dengan lingkungan dan masyarakat di tempat institusi tersebut berdiri.

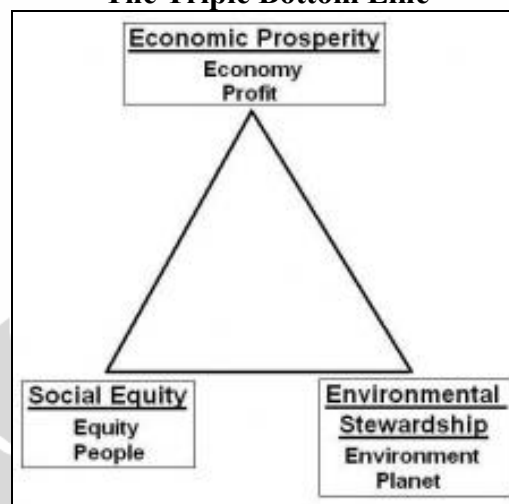
CSR muncul diiringi dengan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak negatif dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Dampak negatif tersebut tentunya harus dapat diminimalkan agar tidak merusak lingkungan ataupun membahayakan kondisi masyarakat namun dapat menguntungkan bagi perusahaan. Paling tidak, kegiatan CSR hendaknya mampu memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi lingkungan serta masyarakat. Kunci keberhasilan dari pelaksanaan CSR berasal dari adanya kerjasama yang sinergis antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

Abd. (2007) menuliskan “Terobosan besar dalam konteks CSR, dilakukan John Elkington pada 1997 dalam bukunya: *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*. Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Lewat konsepnya ini, Elkington, melukiskan bahwa perusahaan – dan bahkan kapitalisme itu sendiri– yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan 3P (*Profit, People, and Planet*). Bukan hanya mengejar *profit*, mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Sejak cetusan Elkington ini, bisa dikatakan CSR kian bergulir kencang, dan makin

kencang setelah World Summit di Johannesburg pada tahun 2002, yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.” Adapun gambaran dari konsep *triple bottom line*, digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**

**The Triple Bottom Line**



Sumber: [http://www.centerforsustainability.org/images/directory/triple\\_bottom\\_line\\_4.JPG](http://www.centerforsustainability.org/images/directory/triple_bottom_line_4.JPG)  
(Juni 2010)

Zaelani (2007) menyatakan, “Belakangan ini bersama dengan tampilnya etika bisnis, orang mulai menyadari adanya keterkaitan antara nilai-nilai spiritualitas dengan keberlanjutan dan perkembangan sebuah usaha. Dalam konteks spiritual bisnis, bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Tapi bagaimana bisnis yang dijalankan bisa memberikan keuntungan dan keberkahan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada prakteknya sebuah usaha melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada. Singkatnya, para insan bisnis harus sadar akan nilai-nilai pragmatik nilai-nilai (*the pragmatic value of values*). Yang pada masa lalu, nilai-nilai (*values*) dianggap sebagai sesuatu yang dikotomis dengan pengelolaan perusahaan.”

Di Indonesia, gaung CSR baru mulai terdengar sekitar tahun 2000-2001. Namun sayangnya di Indonesia CSR umumnya hanya diterjemahkan sebagai sebuah aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk

kedermawanan sosial, sehingga aktivitas CSR lebih dilihat sebagai *phylantrophy* semata bukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Padahal jika ditelisik lebih mendalam, penerapan CSR yang tepat guna justru mampu menjadi strategi bisnis yang jitu dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan.

Ironisnya lagi, kegiatan CSR cenderung disamakan dengan *community development* yang bertujuan untuk memperoleh citra positif di mata *stakeholders* sehingga akan meningkatkan popularitas perusahaan di mata publik. Padahal jika dipahami lebih mendalam, *community development* hanyalah salah satu bagian dari CSR. Mengingat pemahaman umum bahwa CSR lebih cenderung difokuskan pada *community development*, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia pun lebih memfokuskan kegiatan CSR-nya pada jenis kegiatan tersebut. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI).

ANCRI merupakan salah satu unit bisnis yang merupakan bagian dari Akzo Nobel Global yang merupakan perusahaan cat berskala internasional. Perusahaan ini pernah mengalami masa-masa sulit di antara tahun 2004-2006 dan vakum kepemimpinan selama 6 bulan sehingga hampir ditutup oleh kantor pusatnya. Namun setelah perbaikan di berbagai bidang dilakukan, ANCRI mulai mampu menunjukkan eksistensinya. Salah satunya melalui aktivitas CSR yang cukup menonjol dan cukup diperhitungkan di ajang *Indonesia Sustainability Reporting Award 2008* yang dilakukan oleh ANCRI berupa *Sustainability Community Development for Fisherman Family in Marunda*. Selain aktivitas tersebut, masih ada beberapa aktivitas CSR lainnya yang dilakukan oleh ANCRI dan layak mendapatkan apresiasi publik.

Sebagai perusahaan yang belum terlalu lama melewati masa-masa krisisnya, hal ini tentu menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji dan dievaluasi lebih jauh terutama dari sisi aktivitas pelaksanaan, pelaporan, dan *sustainability* dari aktivitas-aktivitas CSR tersebut. Ditambah belum banyaknya perusahaan yang benar-benar secara nyata menerapkan dan mencantumkan prinsip 3P di dalam aktivitas CSR-nya.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Aktivitas-aktivitas CSR berupa *community development* yang dilakukan oleh ANCRI pada awalnya bersifat *one shot* (tidak bersifat *sustainable*). Akan tetapi terdapat aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya disadari memiliki potensi positif untuk jangka panjang untuk terus dilaksanakan (*sustainable*) karena memiliki kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

*Sustainability Community Development for Fisherman Family in Marunda* adalah program CSR berupa *community development* pertama yang dilakukan oleh ANCRI secara *sustainable*. Aktivitas CSR ini akan dibahas di dalam tesis karena adanya indikasi keterkaitan dengan program MDG (*Millenium Development Goals*) yang sedang digalakkan oleh pemerintah belakangan ini dan berorientasi dengan prinsip 3P. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh ANCRI di dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang masih bergantung pada kebijakan Akzo Nobel Global yang berada di Belanda, belum adanya departemen khusus yang mengani masalah CSR, besarnya biaya untuk membayar tenaga ahli guna menyokong aktivitas CSR, serta permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul di lapangan pada saat pelaksanaan aktivitas CSR.

Pelaporan pun menjadi bagian penting di dalam aktivitas CSR karena merupakan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap aktivitas yang telah dilaksanakannya. Di dalam pelaporan dapat dilihat secara garis besar sistematika pelaksanaan aktivitas CSR.

Adapun masalah penelitian sebagaimana penjabaran di atas adalah:

1. Apakah aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI di Marunda benar-benar berjalan secara *sustainable*?
2. Aktivitas-aktivitas apa sajakah di Marunda yang sesuai dengan program MDG?
3. Bagaimana ANCRI membuat laporan CSR-nya?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi:

1. Aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI, terutama pada aktivitas *Sustainability Community Development for Fisherman Family in Marunda*.
2. Kesesuaian aktivitas CSR ANCRI di Marunda dengan program MDG (*Millenium Development Goals*) yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
3. Laporan CSR yang dibuat oleh ANCRI.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh adalah:

1. Bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan positif sehingga dapat melaksanakan program-program CSR dengan lebih baik lagi, khususnya yang berbentuk *community development*.
2. Bagi masyarakat dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), diharapkan untuk dapat ikut berperan aktif di dalam program-program CSR yang diselenggarakan oleh perusahaan.
3. Bagi penulis dan para akademisi, penelitian ini diharapkan akan dapat membuka wawasan yang lebih luas dalam mensosialisasikan aplikasi aktivitas dan pelaporan CSR, terutama jika dikaitkan dengan program MDG.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan di dalam penulisan tesis ini adalah:

### 1. Analisis Deskriptif

Menurut Irawan (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Dengan demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, dan keadaan.

Sesuai dengan metode tersebut, maka penelitian akan difokuskan untuk menganalisis aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI.

### 2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan guna mengumpulkan informasi-informasi yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, atau pun literatur-literatur lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas di dalam tesis.

### 3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan untuk memperoleh informasi-informasi penting mengenai permasalahan yang diangkat dalam tesis dilakukan dalam dua tahap, yakni:

#### a. Melakukan *site visit* ANCRI di Kawasan Industri Pulo Gadung

*Site visit* ke ANCRI dilakukan untuk mewawancarai penanggung jawab program CSR di Marunda (manajer *Human, Safety, Quality, and Environment* di ANCRI) dan Direktur Utama ANCRI. Selain itu, *site visit* juga dimaksudkan untuk memperoleh data-data serta laporan-laporan ANCRI yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam tesis.

#### b. Melakukan *site visit* ke Marunda

*Site visit* ke Marunda dilakukan untuk melihat kesesuaian antara laporan CSR yang dilakukan oleh ANCRI di Marunda dengan

kondisi *real* yang ada. *Site visit* juga dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat dan lingkungan Marunda pada saat ini dan mewawancarai wakil masyarakat Marunda mengenai dampak positif maupun negatif dari aktivitas CSR yang telah dilakukan di wilayah tersebut.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Tujuan disajikannya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan tesis dan memberikan gambaran yang sistematis di dalam memahami masalah-masalah yang dibahas. Tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai gambaran, secara garis besar penguraian kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul tesis, permasalahan penelitian yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang dipergunakan, dan sistematika penulisan tesis.

### **Bab 2 Landasan Teori**

Bab ini berisikan telaah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang terkait dengan topik yang diteliti, dalam hal ini mengenai masalah CSR serta berita-berita mengenai ANCRI serta program MDG (*Millenium Development Goals*).

### **Bab 3 Latar Belakang Perusahaan**

Bab ini menceritakan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan, bidang usaha yang digeluti, dan hal-hal lainnya mengenai perusahaan yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti.

**Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian**

Bab ini merupakan uraian dan deskripsi dari hasil penelitian di perusahaan yang bersangkutan.

**Bab 5 Kesimpulan**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi dan saran kepada pihak terkait mengenai penanggulangan masalah yang diteliti, pemanfaatan hasil penelitian atau penelitian lebih lanjut yang perlu dilakukan, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Wibisono (2007, hal.7) menyatakan, “Yang menarik dari konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi tunggal.” Pernyataan ini seperti menegaskan bahwa pendefinisian CSR masih tergantung pada persepsi masing-masing pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, perkembangan konsep CSR yang cenderung pesat pun telah membuatnya semakin sulit untuk didefinisikan secara tepat.

“Pada kenyataannya, CSR mempunyai makna yang berbeda bagi orang yang berbeda (*CSR means different thing to different people*). Bagi sementara orang, CSR adalah prakarsa-prakasa untuk menaikkan reputasi. Bagi yang lain, CSR adalah suatu tindakan kedermawanan yang mulia. Bagi sedikit orang, CSR adalah filosofi yang menjadi dasar operasi perusahaan" (Hasibuan & Sedyono, 2006, hal.73).

##### 2.1.1. Definisi CSR

Wibisono (2007, hal.7-8) menuliskan beberapa definisi dari CSR menurut beberapa organisasi, antara lain:

1. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* mendefinisikan CSR sebagai berikut:

*“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community large.”*

2. *World Bank* memandang CSR sebagai:

*“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.”*

3. Uni Eropa (*EU Green Paper of CSR*) mengemukakan bahwa:

*“CSR is concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basic.”*

Sementara Hidayat (2009) menuliskan definisi-definisi CSR sebagai berikut:

1. A + CSR Indonesia (*social enterprise* yang menghimpun berbagai keahlian profesional dalam isu-isu seputar CSR)

*“Upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif tiap pilar.”*

2. *International Finance Corporation*

*“The commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.”*

3. Milton Friedman

*“Use its (corporate) resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game,*

*which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.”*

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat disimpulkan secara umum bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab suatu entitas (baik pemerintah maupun swasta) terhadap para *stakeholder* dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif aktivitas yang dilakukannya dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (*the triple bottom line*).

### 2.1.2. Sejarah CSR

Hidayat (2009) menjabarkan tahapan-tahapan sejarah CSR sebagai berikut:

#### a. Tahun 1950-an (CSR Modern)

Literatur-literatur awal yang membahas CSR pada tahun 1950-an menyebut CSR sebagai *Social Responsibility* (SR bukan CSR). Tidak disebutkannya kata *corporate* dalam istilah tersebut kemungkinan besar disebabkan pengaruh dan dominasi korporasi modern belum terjadi atau belum disadari.

Buku karangan Howard R. Bowen yang berjudul “*Social Responsibility of The Businessman*” dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu Bowen memberikan definisi awal dari CSR sebagai: “... *obligation of businessman to pursue those policies, to make those decision or to follow those line of action wich are desirable in term of the objectives and values of our society.*” (Bowen, 1953, hal. 6).

Walaupun judul dan isi buku Bowen bias gender (hanya menyebutkan *businessman* tanpa mencantumkan *businesswoman*), sejak penerbitan buku tersebut definisi CSR yang diberikan Bowen memberikan pengaruh besar kepada literatur-literatur CSR yang terbit setelahnya. Sumbangsih besar pada peletakan fondasi CSR tersebut membuat Bowen pantas disebut sebagai Bapak CSR.

## b. Tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan "*Iron Law of Responsibility*" yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*). Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang.

Kata *corporate* mulai dicantumkan pada masa ini. Hal ini bisa jadi dikarenakan sumbangsih Davis yang telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi.

Tahun 1962, Rachel Carlson menulis buku yang berjudul "*Silent Spring*". Buku tersebut dianggap memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam. Buku tersebut berisi efek buruk penggunaan DDT sebagai pestisida terhadap kelestarian alam, khususnya burung. DDT menyebabkan cangkang telur menjadi tipis dan menyebabkan gangguan reproduksi dan kematian pada burung. *Silent Spring* juga menjadi pendorong dari pelarangan penggunaan DDT pada tahun 1972. Selain penghargaan *Silent Spring* juga menuai banyak kritik dan dinobatkan sebagai salah satu "buku paling berbahaya abad ke-19 dan ke-20 versi majalah *Human Events*."

Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah *Corporate Citizenship*. McGuire (1963, hal.144) menyatakan bahwa: "*The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations*"



McGuire kemudian menjelaskan lebih lanjut kata *beyond* dengan menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, “kebahagiaan” karyawan dan seluruh permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak “baik,” sebagai mana warga negara (*citizen*) yang baik.

**c. Tahun 1970-an**

Tahun 1971, *Committee for Economic Development (CED)* menerbitkan *Social Responsibilities of Business Corporations*. Penerbitan yang dapat dianggap sebagai *code of conduct* bisnis tersebut dipicu adanya anggapan bahwa kegiatan usaha memiliki tujuan dasar untuk memberikan pelayanan yang konstruktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

CED merumuskan CSR dengan meng gambarkannya dalam lingkaran konsentris. Lingkaran dalam merupakan tanggung jawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan ekonomi (*profit* dan pertumbuhan). Lingkaran tengah menggambarkan tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil. Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat.

Tahun 70-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Dalam artikel yang berjudul “*Dimensions of Corporate Social Performance*”, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*. Menurut Sethi, *social obligation* adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal ini *social obligation* hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. *Social responsibility* merupakan

perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. *Social responsiveness* merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. *Social responsiveness* merupakan tindakan antisipasi dan preventif.

Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa *social obligation* bersifat wajib, *social responsibility* bersifat anjuran dan *social responsiveness* bersifat preventif. Dimensi-dimensi kinerja sosial (*social performance*) yang dipaparkan Sethi juga mirip dengan konsep lingkaran konsentris yang dipaparkan oleh CED.

#### d. Tahun 1980-an

Era ini ditandai dengan usaha-usaha yang lebih terarah untuk lebih mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya *corporate responsibility*. Walaupun telah menyinggung masalah CSR pada 1954, Empu teori manajemen Peter F. Drucker baru mulai membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984. Drucker berpendapat: "*But the proper 'social responsibility' of business is to tame the dragon, that is to turn a social problem into economic opportunity and economic benefit, into productive capacity, into human competence, into well-paid jobs, and into wealth*" (Drucker, 1984, hal.62)

Dalam hal ini Drucker telah melangkah lebih lanjut dengan memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* – juga dikenal sebagai *Brundtland Report* untuk menghormati Gro Harlem Brundtland yang menjadi ketua WECD waktu itu. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda

politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**e. Tahun 1990-an**

*Earth Summit* dilaksanakan di Rio de Janeiro pada 1992 dan dihadiri oleh 172 negara dengan tema utama Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Pertemuan tersebut menghasilkan Agenda 21, Deklarasi Rio dan beberapa kesepakatan lainnya. Hasil akhir dari pertemuan tersebut secara garis besar menekankan pentingnya *eco-efficiency* dijadikan sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan.

“Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah definisi CSR mulai berkembang,” (Wibisono, 2007, hal.7).

**2.1.3. Penerapan CSR**

Pada umumnya penerapan CSR (terutama di kalangan entitas bisnis) dilakukan berdasarkan konsep *triple bottom line* dari Elkington. Walaupun setiap entitas memiliki skema yang berbeda-beda di dalam menginterpretasikan penerapan CSR, namun karena berasal dari satu konsep yang sama, maka ruang lingkupnya pun cenderung serupa. “Kegiatan yang dilakukan dalam berupa *community development* yang kemudian dikembangkan untuk mencapai citra yang baik di mata para *stakeholders* perusahaan,” (Pambudi, 2006, hal.9).

Eleanor Chambers dan kawan-kawan pada tahun 2003 melakukan penelitian atas praktik tanggung jawab sosial korporat di tujuh negara Asia mengklasifikasikan CSR ke dalam tiga aspek yaitu, keterlibatan dalam komunitas,

pembuatan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, dan *employee relations* (Wibisono, 2007, hal.126).

Wibisono (2007, hal.127-131) mengungkapkan bahwa pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan pertahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*, *CSR Assessment*, dan *CSR Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

*CSR Assessment* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diprioritaskan dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membangun *CSR Manual*. Hasil *assessment* merupakan dasar untuk penyusunan *manual* atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah *instant*, penyusunan *manual* ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

*Manual* ini merupakan inti dari perencanaan, karena *manual* ini adalah “kitab suci” yang memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan *manual CSR* dibuat sebagai acuan, pedoman, dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir

dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif, dan efisien.

## 2. Tahap Implementasi

Dalam memulai implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, serta bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi:

- a. pengorganisasian (*organizing*) sumber daya yang diperlukan,
- b. penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya,
- c. pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan,
- d. pengawasan atau koreksi (*controlling*) terhadap pelaksanaan,
- e. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, dan
- f. penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap implementasi ini terdiri atas tiga langkah utama yakni sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR, khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan salah satu direktur atau CEO yang ditunjuk sebagai *CSR champion* di perusahaan. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR yang diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar *roadmap* yang telah

disusun. Sedang internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran, dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tapi sudah *beyond compliance*.

### 3. Tahap Evaluasi

Setelah program CSR diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas pelaksanaan CSR.

Evaluasi bukan merupakan tindakan mencari-cari kesalahan, tetapi dilakukan untuk untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan. Langkah ini tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar tetapi juga mencakup pengendalian resiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk *assessment audit* atau *scoring* juga dapat dilakukan secara mandatori, misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN, untuk beberapa aspek penerapan CSR. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

### 4. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun

keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholders* juga untuk *stakeholders* lainnya yang memerlukan.

Suharto (2008) mengungkapkan bahwa *good CSR* memadukan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk *community development*:

1. *Engagement*

Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun "kontrak sosial" antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. *Assessment*

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of Action*

Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholders* di lain pihak.

#### 4. *Action and Facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. *Monitoring*, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

#### 5. *Evaluation and Termination or Reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT (*Training of Trainers*) CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholders*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

### 2.1.4. Mekanisme Penerapan Program CSR

Wibisono (2007, hal.145) mengungkapkan bahwa mekanisme penerapan program atau kegiatan CSR dapat dilakukan sebagai berikut:

#### 1. *Bottom Up Process*

Program berdasar pada permintaan *beneficiaries*, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan.

#### 2. *Top Down Process*

Program berdasar pada *survey*/pemeriksaan seksama oleh perusahaan, yang disepakati oleh *beneficiaries*.



### 3. *Partisipatif*

Program dirancang bersama antara perusahaan dengan *beneficiaries*.

Majalah SWA, dalam suatu riset (berlangsung Juni - November 2005) terhadap 45 perusahaan tentang pelaksanaan CSR, menemukan fakta-fakta menarik. Dengan memfokuskan pada tiga komponen yang sering dianggap sebagai inti CSR yang dikenal juga sebagai *triple bottom line*, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan, perusahaan-perusahaan tersebut memberi sejumlah jawaban, untuk program, aspek sosial masih mendominasi aktivitas CSR perusahaan, 49.53% (Pambudi, 2006, hal.12).

#### 2.1.5. CSR dan Strategi Bisnis

Strategi yang tepat akan membuat sebuah perusahaan mampu untuk mengungguli para pesaingnya. Salah satu strategi yang umum dipergunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia dewasa ini adalah CSR. Hal ini dilakukan karena CSR dianggap cukup efektif sebagai *promotion tools* dan *public relation*. CSR pun bisa dijadikan sebagai alat bukti keseriusan dan kepedulian perusahaan terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan tersebut.

Hutomo (2008) mengungkapkan bahwa tujuan CSR adalah untuk menumbuhkan kesadaran etis dalam melakukan bisnis mulai dari pengelolaan ketenagakerjaan, proses produksi, riset dan pengembangan, pemasaran, hingga upaya pembuangan limbah yang dapat menjaga lingkungan. CSR disarankan diadopsi oleh perusahaan besar agar tidak sekedar memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan tetapi lebih mau peduli pada permasalahan sosial yang terjadi. Jadi, bagi perusahaan besar diharapkan mau proaktif dan memiliki komitmen dalam membangun CSR. Sedangkan bagi perusahaan kecil cukup dengan mematuhi ketentuan-ketentuan secara legal mengingat keterbatasan sumber-sumber ekonomi dalam menanggapi permasalahan sosial yang muncul. Pengembangan CSR mendorong perusahaan untuk lebih bertanggungjawab

terhadap aneka perubahan cepat yang terjadi. Maka, bagi perusahaan yang mengembangkan CSR akan menikmati manfaat:

1. menumbuhkan manajemen strategik yang selalu berorientasi pada solusi (*win-win solution*);
2. menciptakan keunggulan kompetisi atas produk yang dihasilkan baik secara lokal, nasional maupun internasional;
3. mengembangkan relasi yang harmonis dan kolaboratif dengan *stakeholders*, seperti karyawan, konsumen, pemerintah, serikat pekerja, LSM dan masyarakat secara umum;
4. pola pengembangan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dapat diintegrasikan dengan pengelolaan operasi perusahaan sehingga menumbuhkan inisiatif-inisiatif positif dalam manajemen;
5. mempublikasikan aktivitas sosial sebagai wujud CSR untuk membangun citra publik (*public image*) terhadap perusahaan, sekaligus meningkatkan daya sensitivitas (sosial) manajemen dalam proses pembuatan keputusan.

Sementara Kurniawan (2009) menyatakan “CSR dapat dimulai dengan komitmen awal dari pimpinan perusahaan, kemudian dilaksanakan analisa kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, mengkaji ulang struktur internal, strategi dan rencana tindak yang berkaitan dengan program CSR, pelaksanaan CSR sampai dengan tahap pengukuran dan pelaporan hasil program CSR. Kerangka kerja dan mekanisme program CSR seyogyanya bersifat spesifik dan berbasis pada kepentingan masyarakat bukan hanya sekedar mewakili kepentingan perusahaan sehingga pada akhirnya kemandirian masyarakat dapat terwujud. Program bersifat elitis dan ditujukan hanya untuk kepentingan perusahaan menimbulkan sinisme dan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi. Diperlukan perubahan kerangka berpikir baik oleh perusahaan, pemerintah dan lembaga lainnya untuk meletakkan kepentingan masyarakat pada

posisi sentral realisasi program. Keputusan-keputusan strategis baik pada aspek substansi maupun pilihan pendekatan harus didasarkan pada masalah yang dihadapi masyarakat.”

#### 2.1.6. Manfaat CSR

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan (Wikipedia, 2010):

1. *Brand differentiation*

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*.

2. *Human resources*

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat wawancara, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

3. *License to operate*

Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ”ijin” atau ”restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

4. *Risk management*

Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan

lingkungan. Membangun budaya ”*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.

### 2.1.7. Pelaporan dan Pengungkapan Program CSR di Indonesia

Laporan adalah suatu pemberitahuan dan pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilaksanakan yang disusun secara sistematis dan kronologis. Laporan dibutuhkan sebagai alat komunikasi dan evaluasi. Laporan aktivitas CSR suatu perusahaan merupakan alat komunikasi antara perusahaan yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi tingkat keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas CSR.

Wibisono (2007) mengungkapkan alasan perusahaan, secara umum, melakukan pelaporan atas aktivitas CSR yang dilakukannya, antara lain:

1. *Values driven approach* (sifatnya demonstratif)
2. *Regulation driven* (bersifat *comply*, keinginan untuk memenuhi standar)
3. *Business case/reputation driven* (bersifat proteksi/membangun reputasi)
4. *Stakeholders / trust driven* (membangun kepercayaan)
5. *Competition peer driven* (keinginan untuk tampil beda)

Adapun nama laporan CSR yang dikenal oleh publik adalah *Sustainability Report* (Laporan Keberlanjutan).

Pengungkapan kinerja CSR melalui laporan keberlanjutan kini semakin penting terutama untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Melalui laporan ini akan terungkap: apakah perusahaan sudah menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal (Darwin, 2006, hal.89)

Sistem pelaporan (*guideline*) yang paling banyak dijadikan rujukan dalam laporan CSR saat ini adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Tahun 2000 untuk

pertama kalinya GRI mempublikasikan *guideline*-nya disusul publikasi untuk *expanded version*-nya pada Agustus 2002.

*Global Reporting Initiatives* (GRI), dikeluarkan pada tahun 1999, tetapi saat ini masih terus berkembang. GRI merupakan standar pelaporan internasional yang dapat digunakan secara sukarela oleh organisasi. Pelaporan tersebut mencakup dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan organisasi, baik produksi barang maupun jasa. Dengan menggunakan masukan dari para pelapor dan pengguna laporan, GRI berupaya menyusun daftar indikator yang spesifik untuk pelaporan kinerja di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa karena GRI adalah kerangka pelaporan non keuangan, GRI tidak memberikan rekomendasi atas *business conduct*, namun kerangka pelaporan sangat dipertegas oleh norma-norma dalam *business conduct*. GRI dipelopori oleh *Coalition of Environmentally Responsible Economies* (CERES) yang didalamnya adalah organisasi non pemerintah, perusahaan, konsultan, firma *accounting*, asosiasi bisnis, akademik, dan berbagai pihak lainnya. UNEP (*United Nations Environment Programme*) menyumbang sebagian dana. GRI tidak menilai kesesuaian kinerja perusahaan dengan petunjuk pelaporannya. (<http://asprosbinareka.com/info.php?act=artDet&id=121>, 2010).

Sementara Wibisono (2007) menuliskan pembagian *guidelines* GRI 2002 sebagai berikut:

1. Penggunaan *Guidelines*

Berisi tentang informasi sekitar pedoman, termasuk deskripsi, siapa yang seharusnya memanfaatkan, dan bagaimana mempersiapkan laporan.

2. Prinsip-prinsip *Reporting* (Laporan)

Berisi tentang prinsip-prinsip laporan dan bagaimana pengorganisasiannya.

### 3. *Isi Report*

Terdiri dari visi dan strategi, profil, struktur dan sistem manajemen, indikator kinerja (ekonomi, lingkungan, dan sosial).

### 4. *Glossary* dan lampiran-lampiran

Di Indonesia, laporan nonkeuangan secara umum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2007 tentang Penyajian Laporan Keuangan (paragraf 09) yang menyatakan bahwa ”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

## 2.2. *Community Development*

*Community development* kerap disamakan dengan CSR, namun jika ditilik melalui pengertian dan aktivitasnya, *community development* adalah bagian dari CSR. *Community development* adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, dan bentuk dari tanggung jawab inilah yang disebut sebagai CSR.

Seorang pakar *Community Development* (Arthur Dunham), sebagaimana dikutip oleh Siwi (2008), merumuskan *community development* sebagai “*organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization.*”

Siwi (2008) mengungkapkan bahwa berdasarkan definisi *community development* yang dikatakan oleh Dunham, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Community development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi – *follow-up activity and evaluation*.
2. *Community development* bertujuan memperbaiki – *to improve* - kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. *Community development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. *Community development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama – *group action* – di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Lebih jauh Siwi mengungkapkan bahwa *community development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan menghindari metode kerja “*doing for the community*”, tetapi mengadopsi metode kerja “*doing with the community*”. Sebab metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with* akan merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya – *real needs, felt needs* dan *expected need* .

### 2.3. *Millenium Development Goals (MDG)*

Pada bulan September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain (termasuk pemerintah Belanda), berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. (www.wikipedia.org, 2010)

Wibisono (2007) menuliskan 8 tujuan utama dari MDG, antara lain:

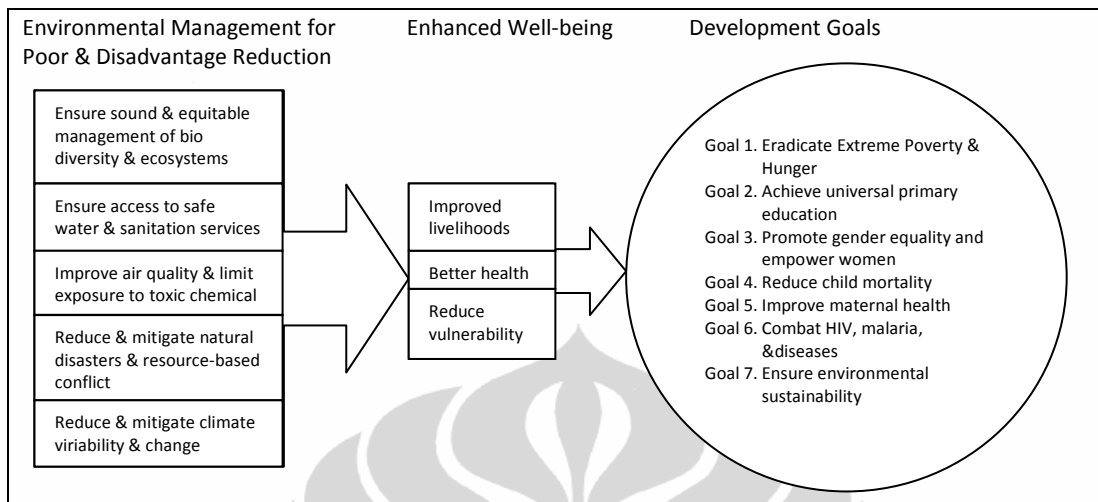
1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah. Target untuk 2015 adalah mengurangi setengah proporsi dari jumlah orang sedunia hidup dengan kurang dari satu dollar sehari dan mengurangi setengah proporsi dari jumlah orang sedunia yang mengalami kelaparan.
2. Pencapaian pendidikan dasar secara universal. Target 2015 adalah, memastikan bahwa setiap anak lelaki atau perempuan mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Target 2005 dan 2015 adalah mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dan pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan untuk tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak. Target 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah lima tahun.



5. Meningkatkan kesehatan ibu. Target 2015 adalah mengurangi dua per tiga rasio angka kematian ibu dalam proses melahirkan.
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Target 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan menghentikan dan memulai pencegahan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.
7. Menjamin berlanjutan pembangunan lingkungan. Target 2015 adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program, serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Target selanjutnya, pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Target berikutnya, pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Target-target pada tahun 2015 adalah mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pengembangan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, negara-negara terpencil, dan kepulauan-kepulauan kecil. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang. Dalam kerjasama dengan negara-negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda. Dalam kerjasama dengan negara-negara penghasil obat-obatan, membuka akses untuk menghasilkan obat-obatan penting pada negara yang sedang berkembang. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 2.1.

***Environmental and The Millenium Developmet Goals***

Sumber: [http://dhenov.blogspot.com/2007\\_12\\_01\\_archive.html](http://dhenov.blogspot.com/2007_12_01_archive.html), Juni 2010

Sementara jika dikaitkan dengan CSR, bisa dikatakan bahwa CSR merupakan salah satu cara perusahaan dalam membantu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan MDG. Jika perusahaan bersedia mengambil bagian di dalam program MDG melalui aktivitas CSR-nya, bukan tidak mungkin target-target MDG tersebut dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

CSR, jika dipahami dengan benar, merupakan kekuatan terbesar bagi perusahaan untuk mendukung pemerintah mencapai tujuan MDGs. Melalui CSR, perusahaan mampu memperluas kesempatan akses pendidikan bagi masyarakat, membuka kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk berkarya dan mencapai posisi yang setinggi-tingginya, menghapuskan penggunaan buruh anak, pembinaan dan kemitraan dengan pengusaha kecil menengah, pelestarian budaya, mendukung program penanggulangan narkoba sebagai salah satu upaya memerangi HIV/AIDS, dll. Memang, dalam pelaksanaannya tema CSR yang dilakukan oleh perusahaan bukan yang sedang menjadi tren saja. CSR selalu bersifat lokal dan *genuine*. Artinya, memang kegiatan CSR harus dilakukan dengan melihat kondisi dan kebutuhan perusahaan (internal dan eksternal), yang tentunya satu dengan yang lain akan berbeda (Pitaloka, 2008). Akan tetapi perlu diingat bahwa MDG tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama yang sinergis

antara pemerintah, pihak swasta (perusahaan), dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).



## BAB 3

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 3.1. Profil Perusahaan

Sebagaimana diungkapkan pada situs resmi Akzo Nobel Global, Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI) merupakan bagian dari Akzo Nobel Global yang merupakan perusahaan cat terbesar di dunia yang bermarkas di Belanda. Perusahaan ini merupakan salah satu bisnis unit dari Akzo Nobel Global yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan, aktivitas, dan pelaporan yang dilakukan oleh ANCRI masih berkiblat dan dipusatkan di Akzo Nobel Global pusat yang berada di Amsterdam, Belanda.

##### 3.1.1. Sejarah Singkat Akzo Nobel

Akzo Nobel beroperasi di lebih dari 80 negara dengan lebih dari 550.000 pegawai di seluruh dunia dan merupakan salah satu perusahaan cat dan *coating* terbesar di dunia dengan spesialisasi utama pada bahan-bahan kimia. Perusahaan ini menyuplai konsumen baik secara individu maupun untuk industri-industri besar.

Sejarah berdirinya Akzo Nobel diawali pada tahun 1646 pada saat tempat penempaan besi bernama Bofors didirikan di Swedia. Tahun 1777, Det Holmbladske Selskab, yang sekarang bernama Sadolin, didirikan di Denmark, dan kini Sadolin menjadi salah satu merk dagang andalan Akzo Nobel untuk cat dekoratif. Tahun 1792, seorang pelukis dan dekorator bernama Wiert Willem Sikkens membuat *brand* untuk pernis yang dinamai Sikkens di kota Groningen Belanda. Di tahun 1871 Kema Nobel didirikan di Swedia dan pada tahun 1984 perusahaan tersebut bergabung dengan Bofors untuk membentuk Nobel Industries, yang pada tahun 1994 diakuisisi oleh Akzo.

Alfred Nobel (orang yang berada di balik Hadiah Nobel) mendirikan Elektrokemiska Aktiebolaget, yang dikenal sebagai Eka, di Bengtsfors, Swedia pada tahun 1895. Perusahaan ini didirikan untuk memproduksi klorin dan alkali. Pada saat ini Eka Chemicals dikenal sebagai Akzo Nobel Pulp & Paper Chemicals yang merupakan bagian dari Akzo Nobel. Pada tahun 1918 Konijknle Nederlandse Zoutindustrie mengawali industri garam di Belanda untuk memenuhi kurangnya pasokan garam pada saat Perang Dunia I. Sementara di tahun 1923, Saal van Zwanenberg mendirikan Organon yang memproduksi insulin yang berasal dari pankreas hewan. Pada tahun 1965, Konijknle Nederlandse Zoutindustrie dan Organon bergabung dan menjadi Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO).

Di tahun 1911 perusahaan industri rayon di Belanda didirikan oleh Jacque Coenraad Hartogs di Arnhem dan diberi nama Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem yang lalu berganti nama menjadi Nederlandse Kunstzijdefabriek. Tahun 1929, perusahaan ini bergabung dengan produsen serat dari Jerman, Vereinigte Glanzstoff Fabriken dan berganti nama menjadi Algemene Kunstzijde Unie (AKU). AKU dan KZO bergabung membentuk Akzo pada tahun 1969. Tahun 1969 perusahaan serat dari Inggris, Courtaulds, mengakuisisi International Paints dan pada tahun 1998 diakuisisi oleh Akzo Nobel, dimana pada tahun 1994 Akzo Nobel Industries telah bergabung di dalamnya.

### **3.1.2. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI)**

Akzo Nobel Car Refinishes merupakan salah satu *supplier* terdepan dalam pasar industri cat dan pelayanan perbaikan mobil, kendaraan niaga, dan *automotive plastic* di seluruh dunia. Perusahaan ini beroperasi di lebih dari 60 negara. Divisi *car refinishes* ini berada di bawahan naungan *Performance Coating* di Akzo Nobel. Sedangkan ANCRI, yang merupakan bagian dari bisnis unit Akzo Nobel Car Refinisher, adalah pabrik produsen cat mobil di Indonesia. Sepanjang berdirinya ANCRI mengalami pasang surut dan pada tahun 2004 hampir

mengalami kebangkrutan yang diakibatkan kurangnya mutu dari produk yang dihasilkan serta adanya perbedaan harga antar pabrik diseluruh dunia yang menyebabkan ANCRI kehilangan para pelanggannya.

Dengan melakukan perbaikan mutu dan restrukturisasi manajemen yang dilakukan, pada akhirnya ANCRI dapat beroperasi lagi dengan baik bahkan dipercaya untuk memproduksi cat *auto based-plast* yang berjumlah 83 *print* warna yang membuatnya memperoleh penghargaan global untuk katagori *the improval for operational excellence* yang diberikan Akzo Nobel Global di tahun 2008. Saat ini ANCRI menguasai 6% pasar *car refinishes* di asia pasifik namun diantara pabrik *car refinisher* di dunia ANCRI menguasai 60% pasar dunia. Tidak mengherankan jika ANCRI memperoleh ISO 12000. Sedangkan *site* yang berada di Kawasan Industri Pulogadung menjadi salah satu *site* Akzo Nobel di dunia dengan klasifikasi “*Good*” dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (<http://berandakawasan.wordpress.com/2009/09/25/724/>, 2010).

Sejarah berdirinya ANCRI sendiri diawali oleh Brink Molynd dan PT. Tando yang bergabung di tahun 1975. Pada tahun 1986, hasil penggabungan ini dibeli oleh Akzo Nobel dan berubah nama menjadi Akzo Coating Indonesia. Di tahun 1990, Akzo Coating Indonesia melakukan *joint venture* dengan Danapaints Corporation dan pada tahun 1995 akhirnya *joint venture* tersebut sepenuhnya menjadi milik Akzo Nobel dan berubah nama menjadi PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI).

### 3.2. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan mencerminkan apa yang ada didalamnya dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Nilai-nilai tersebut menjadi tuntunan bagaimana perusahaan tersebut menjalankan operasinya, baik secara internal

maupun eksternal. Di Akzo Nobel, nilai-nilai tersebut terangkum dalam *tag line* “*Tomorrow’s answers today*”.

Nilai-nilai yang terangkum di dalam *tag line* “*Tomorrow’s answers today*” tersebut menjadi standar untuk mengukur diri saat berhubungan dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak internal serta masyarakat luas. Nilai-nilai ini memberikan arti yang nyata bagi pihak Akzo Nobel dan cara mereka berperilaku.

Adapun nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Akzo Nobel, antara lain:

1. Mengutamakan masa depan dari para pelanggan terlebih dahulu (*Focusing on our customers’ future first*)

Akzo Nobel meyakini bahwa masa depannya dapat terjamin apabila mampu memberikan produk dan pelayanan yang menjamin masa depan para pelanggannya. Alasan akan keinginan Akzo Nobel untuk terus tumbuh dan berkembang adalah adanya keinginan untuk selalu memenuhi segala kebutuhan para pelanggannya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Akzo Nobel.

2. Menganut pola pikir kewirausahaan (*Embracing entrepreneurial thinking*)

Pemikiran dan ide-ide baru adalah hal terpenting di dalam persaingan. Untuk memperoleh hal tersebut, maka dibutuhkan lingkungan dan pola pikir yang mendorong lahirnya ide-ide baru tersebut, baik dari tim maupun individu-individu yang ada.

Kegagalan mungkin saja terjadi, akan tetapi dari kegagalan tersebut akan membuat ide-ide baru lainnya terlahir guna meraih pasar yang lebih baik. Akzo Nobel sangat menghargai dan akan terus mencari individu-individu dengan ide-ide orisinal yang dapat memajukan perusahaan.

3. Mengembangkan potensi yang ada dari sumber daya manusia yang ada (*Developing the talents of our people*)

Akzo Nobel berkeyakinan bahwa sebuah usaha akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Hal inilah yang membuat Akzo Nobel berkomitmen untuk mengembangkan potensi yang ada secara profesional maupun personal sehingga usaha pun akan terus berkembang dengan disokong oleh sumber daya-sumber daya yang terbaik.

4. Keberanian dan rasa ingin tahu untuk menghadapi persoalan yang ada (*The courage and curiosity to question*)

Akzo Nobel bukanlah perusahaan dengan seperangkat aturan dan hierarki yang kaku karena Akzo Nobel berkeinginan agar orang-orang yang berada didalamnya memiliki pola pikir dan cara pandang yang luas. Perusahaan ini selalu menantikan munculnya pertanyaan “Apakah ada cara yang lebih baik?” yang pada dasarnya akan mendorong diri sendiri untuk terus mencari cara yang lebih baik sehingga mau untuk terus mengembangkan diri.

5. Integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan (*Integrity and responsibility in our actions*)

Sebuah usaha membutuhkan kerangka kerja di dalam melakukan aktivitasnya. Para karyawan harus menyadari dan mematuhi peraturan yang ada dimanapun mereka bekerja. Akan tetapi, yang disebut integritas dan tanggung jawab lebih dari sekedar menyadari dan mematuhi peraturan yang ada. Integritas dan tanggung jawab lebih diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar baik sebagai individu maupun perusahaan.

Etika dan tanggung jawab merupakan hal yang penting di Akzo Nobel di dalam menjalankan usahanya. Akzo Nobel meyakini bahwa dengan melakukan hal yang benar, maka orang-orang akan tahu bahwa perusahaan ini terpercaya



sehingga mereka akan mau bergabung dan menjadi bagian didalamnya serta melakukan investasi. Hal ini tentu akan sangat baik bagi perkembangan jangka panjang Akzo Nobel.

### 3.3. Produk

Produk-produk yang dihasilkan oleh Akzo Nobel Car Refinishing merupakan produk-produk dengan *brand* yang memiliki pangsa pasar yang cukup luas di berbagai negara, antara lain:

1. Sikkens  
Sikkens adalah *brand* terkemuka di dunia untuk *car refinishing* selama lebih dari 100 tahun. *Brand* ini menawarkan produk terbaik dengan diiringi dengan pelayanan, pelatihan, dan dukungan dari formulasi yang baik untuk memberikan hasil yang sempurna bagi para penggunanya dan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik bengkel.
2. Sikkens Autocoat BT  
*Brand* ini merupakan *brand* global untuk pengecatan ulang kendaraan niaga dan pasaran *original equipment manufacturer (OEM) and builders*.
3. Lesonal  
Produk Lesonal terkenal akan akurasi warnanya yang baik dan kemudahan di dalam penggunaannya. *Brand* ini dilengkapi dengan sistem *mixing*, dokumentasi warna, dan didukung oleh sistem pelatihan yang baik.
4. Dynacoat  
Produk ini sudah cukup dikenal dengan kualitas dan harga yang terjangkau tanpa mengenyampingkan hasil maksimal yang diberikan.

Produk ini memiliki sistem *mixing* yang unik dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak. Produk ini mengandung unsur VOC (*Volatile Organic Compounds*) yang mudah larut oleh air sehingga lebih aman saat diaplikasikan.

5. Wanda

Wanda adalah salah satu *brand* yang ada di Akzo Nobel sejak tahun 1974. *Brand* ini berasal dari Amerika Selatan dan kini dipasarkan di seluruh wilayah Amerika.

6. U-Tech

Produk ini ditujukan bagi pangsa pasar perniagaan di Amerika Utara.

7. Mason CT

Produk ini tergolong handal, kuat, dan menguntungkan bagi kendaraan niaga.

8. Sign

Produk ini dikhususkan untuk papan penanda (*sign*).

9. Soliant

*Brand* ini menawarkan film dan pelapis yang digunakan pada beragam komponen di industri otomotif. *Brand* ini dijual di bawah merek dagang Fluorex®.

10. Sticker Fix

Produk ini memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil pada kendarannya, misalnya jika terdapat goresan pada cat mobil. Produk ini menggunakan media *sticker* berbahan *vinyl*.

### 3.4. Struktur Organisasi

Akzo Nobel merupakan salah satu perusahaan industri terkemuka di dunia yang mengkhususkan industrinya di bidang cat dekoratif, *performance coating*, dan bahan-bahan kimia. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi antara lain:

1. *Decorative Paints* (Cat Dekoratif)

Divisi ini merupakan bernaungnya *brand-brand* cat dekoratif ternama di dunia. Produk-produk yang berada di bawah divisi ini selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Hal ini dilakukan karena produk yang dihasilkan dipergunakan tidak hanya pada infrastruktur ataupun gedung, tetapi juga pada rumah-rumah.

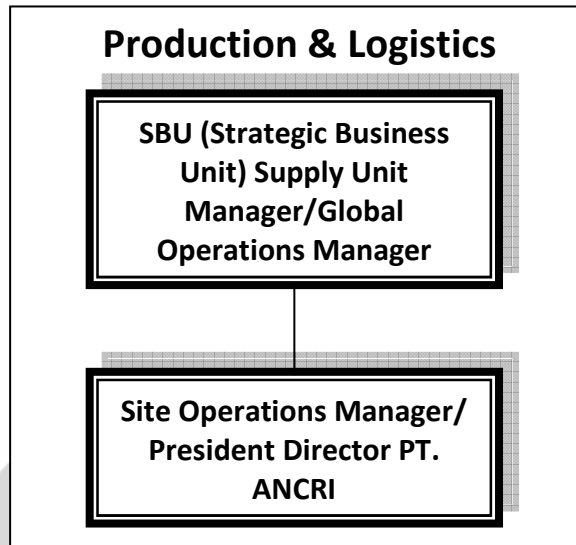
2. *Performance Coatings*

AkzoNobel Performance Coatings merupakan yang terbaik di hampir seluruh bidang usaha yang digelutinya. Divisi ini ada di 60 negara dengan 30.000 pegawai yang terlatih untuk memberikan pelayanan dan solusi terbaik bagi para pelanggan. Adapun pembagian bisnis unit di divisi ini antara lain:

- a. *Car Refinishes*
- b. *Marine & Protective Coatings*
- c. *Powder Coatings*
- d. *Industrial Coatings*
- e. *Wood Finishes & Adhesives*

ANCRI merupakan bagian dari divisi *performance coating* di bawah sub divisi produksi dan logistik di bagian *supply unit / global operation*.

**Gambar 3.1.**  
**Posisi ANCRI di Dalam Akzo Nobel Global**



Sumber: slide presentasi PT. ANCRI

### 3. *Specialty Chemicals*

Bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh divisi ini merupakan bahan penting di berbagai industri, misalnya es krim, aspal, sabun, plastik, dan kertas. Bahkan bahan kimia untuk pemutih kertas yang diproduksi oleh divisi ini menjadi *bestseller*. Adapun pembagian bisnis unit di divisi ini antara lain:

- a. *Surface Chemistry*
- b. *Functional Chemicals*
- c. *Industrial Chemicals*
- d. *Pulp and Paper Chemicals*
- e. *Chemicals Pakistan*

### 4. *Technology and Engineering*

Pada saat pelanggan Akzo Nobel membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan dan keselamatan, proses dan dukungan manufaktur, pengetahuan mengenai toksin, atau manajemen proyek dan desain, maka divisi inilah tempatnya.

### 5. *Global Image Solutions*

Divisi ini merupakan satu titik yang berhubungan dengan seluruh Akzo Nobel *coating solutions*. Seluruh divisi dan bisnis unit Akzo Nobel secara langsung terkoneksi ke divisi ini sehingga akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pelanggan.

### 3.5. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Akzo Nobel merupakan sebuah organisasi besar, namun di dalam organisasi tersebut terdapat individu-individu yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya. Alasan itulah yang mendorong Akzo Nobel untuk melakukan *community program* yang merupakan bagian dari CSR. Program ini ditujukan untuk mendorong setiap individu yang berada di bawah naungan Akzo Nobel untuk turut serta melakukan hal yang berguna bagi lingkungan disekitarnya.

Akzo Nobel memiliki komitmen kepada masyarakat sebagaimana komitmen kepada para pelanggan, pemegang saham, dan karyawannya. Sebagai perwujudan dari komitmen tersebut, maka dibuatlah suatu program yang disebut sebagai Akzo Nobel Community Program. Program ini diharapkan akan memotivasi para karyawan Akzo Nobel di seluruh dunia untuk melakukan perubahan nyata yang berkelanjutan di lingkungan sekitarnya.

Bagi perusahaan seperti Akzo Nobel, standarisasi berskala internasional mutlak diperlukan. Dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Akzo Nobel Global, setiap unit bisnis di perusahaan tersebut wajib memiliki dan mengikuti komitmen yang bersifat internasional. Dalam hal pertanggungjawaban sosial, Akzo Nobel memegang teguh program MDG yang merupakan komitmen di 189 negara di dunia, termasuk Belanda (negara asal Akzo Nobel). Komitmen

ini ditandatangani oleh 189 negara di dunia pada bulan September tahun 2000 di New York, Amerika Serikat.

Creffier (2007) menyatakan, *“The Dutch have set up an 'MDG Scan' to keep the score on what multinational companies do towards realisation of the Millennium Development Goals (MDGs). The Dutch Commission on Sustainable Research (NCDO) has now financed the MDG Scan as a tool to raise awareness of the MDGs in the private sector. The scan allows for detailed comparisons between companies within the same sector and evaluation of the progress of a company over time... Six multinational companies have so far passed the MDG Scan: ABN Amro (banking), Heineken (beer brewer), Philips (electronics), Akzo Nobel (chemicals), BHP Billiton (mining) and TNT (logistics) [part of TPG]... The MDG scan takes into account positive as well as negative contributions to the MDGs. But judged by the number of indicators, the MDG Scan currently stresses indicators that measure positive contributions.”*

Demikian pula halnya dengan standar aktivitas operasional. Setiap unit bisnis Akzo Nobel memiliki sertifikasi internasional seperti OHSAS (*Occupational Health and Safety Advisory Services*) dan ISO (*International Standards of Operation*) yang menyatakan bahwa kinerja unit bisnis tersebut telah memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh Akzo Nobel Global.

Mulai tahun 2004, setiap tahun Akzo Nobel melaporkan kemajuannya di dalam perkembangan kebijakan yang berkelanjutan, manajemen, dan kinerja yang laporannya disusun secara terpisah dengan laporan CSR (2004-2006). Pada tahun 2007, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibuat berdampingan dengan Laporan Tahunan.

Di tahun 2008, Laporan Keberlanjutan digabungkan dengan Laporan Tahunan perusahaan. Hal ini merefleksikan filosofi Akzo Nobel bahwa konsep keberlanjutan yang dianut secara penuh terintegrasi dengan cara Akzo Nobel menjalankan usahanya.

Dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan, Akzo Nobel berkiblat pada GRI (*Global Reporting Initiative*). *Sustainability Reporting Guidelines and Indicators* dari GRI dianggap relevan dengan kondisi dan aktivitas di Akzo Nobel.

Untuk menjadi perusahaan yang lebih bertanggung jawab, Akzo Nobel berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari perusahaan tersebut dan memberikan produk yang terbaik dan berkelanjutan kepada para pelanggan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan jika *sustainability* menjadi nyawa dari segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan. Maka dari itu, *sustainability* selalu diintegrasikan ke dalam setiap aktivitas yang berjalan di Akzo Nobel, demi kepentingan para klien, pemegang saham, dan lingkungan sekitar.

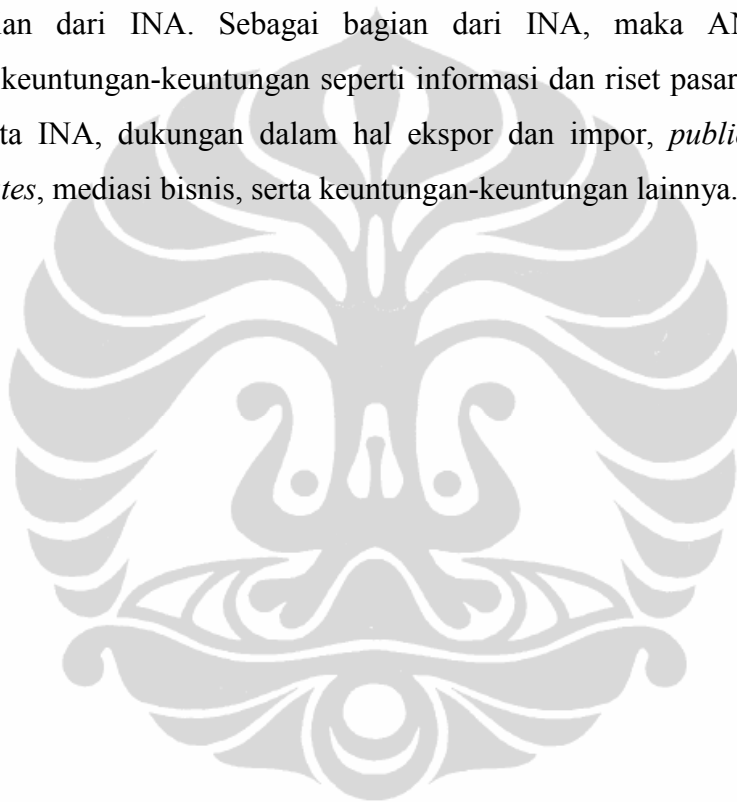
Sebagai bagian dari Akzo Nobel Global, ANCRI pun berinisiatif untuk menggunakan program-program MDG sebagai standar pelaksanaan CSR dalam bentuk *community development*. Program-program CSR yang dilaksanakan ANCRI pada umumnya terfokus pada pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu program di MDG, terutama di Indonesia. Sebagai pendorong motivasi agar *community program* yang dijalankan oleh unit-unit bisnis berjalan sesuai dengan harapan, maka setiap tahun Akzo Nobel Global mengadakan kompetisi antar bisnis unit untuk menentukan bisnis unit manakah yang telah memberikan kontribusi terbaik terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **3.6. ANCRI dan INA (*Indonesian Netherlands Association*)**

Sebagaimana dituliskan situs <http://www.ina.or.id/inaweb/>, *The Indonesian Netherlands Association* (INA), yang didirikan pada tahun 1978, merupakan *official Benelux Chamber of Commerce* yang berada di Indonesia. Asosiasi ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi, mendorong, serta mendukung kerjasama bisnis antara Indonesia dengan negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) dan melayani lebih dari 250 anggotanya. Di

dalam menjalankan aktivitasnya, INA yang beroperasi di Jakarta didukung oleh kantor penghubung yang berada di Den Haag, Belanda. Segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara anggota-anggota INA mendapat dukungan penuh dari Badan Perdagangan Luar Negeri Belanda (EVD).

Sebagai perusahaan yang berasal dari Belanda yang memiliki bisnis unit di Indonesia, Akzo Nobel Global masuk ke dalam keanggotaan INA. Maka, ANCRI sebagai salah satu bisnis unit dari Akzo Nobel Global secara otomatis juga menjadi bagian dari INA. Sebagai bagian dari INA, maka ANCRI pun mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti informasi dan riset pasar di negara-negara anggota INA, dukungan dalam hal ekspor dan impor, *publication and advertising rates*, mediasi bisnis, serta keuntungan-keuntungan lainnya.





## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1. CSR di Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia (ANCRI)

Sebagai perusahaan yang berpusat di Belanda, yang merupakan bagian dari Uni Eropa, definisi CSR yang paling sesuai dengan dengan prinsip CSR Akzo Nobel selama ini adalah definisi dari *EU Green Paper of CSR*. Uni Eropa (*EU Green Paper of CSR*) mengemukakan bahwa, “*CSR is concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*”.

Sebagaimana definisi CSR yang diungkapkan oleh *EU Green Paper*, CSR hendaknya *mengintegrasikan* antara kepedulian lingkungan dan sosial dengan operasi bisnis dan interaksinya dengan para *stakeholders* secara sukarela. Kata sukarela mengacu pada tidak adanya paksaan melainkan kesadaran sebagaimana seharusnya suatu tanggung jawab dilaksanakan. Prinsip inilah yang menjadi dasar pelaksanaan CSR di Akzo Nobel.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bagian penting di dalam aktivitas operasional di Akzo Nobel. CSR menjadi bagian penting di ANCRI sejak terjadi pergantian manajemen di tahun 2006 dan terus berkembang sampai sekarang. Perbaikan-perbaikan di dalam aplikasinya pun dilakukan beriringan dengan laju perjalanan konsep CSR itu sendiri. Di mata Akzo Nobel, CSR merupakan suatu keharusan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tetapi akan dinilai kurang jika CSR dikategorikan sebagai suatu kewajiban yang hanya harus dilakukan oleh perusahaan. Pemaknaan CSR tampaknya lebih diarahkan sebagai filosofi dasar perusahaan dibandingkan sebagai salah satu cara untuk menaikkan reputasi ataupun kegiatan filantropi.

Dapat dikatakan bahwa CSR di Akzo Nobel bersentuhan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, untuk aktivitas yang berupa *community development* tidak harus bersentuhan secara langsung dengan bisnis inti yang dilakukan. Selain itu di dalam pelaksanaan *community development*, terdapat standarisasi yang harus dipatuhi, seperti tidak bolehnya dijadikan sebagai alat promosi, harus mengikutsertakan seluruh karyawan Akzo Nobel, dan mengandung unsur MDG.

Sebuah perusahaan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan eksternal jika kondisi internalnya dalam kondisi yang baik. Oleh sebab itu, Akzo Nobel selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi para karyawannya. Sebagai bagian dari Akzo Nobel Global, hal tersebut juga berlaku bagi ANCRI. Wujud hasil dari kepedulian ANCRI terhadap para karyawannya adalah dianugerahinya *Excellence Award* sebagai “*Best Corporate Sustainability for Employees*” dari ICSA (*INA Corporate Sustainability Award*) untuk program “*6S System as Employee Suggestion Channel on Business Improvement*” pada tahun 2009.

Adapun 6S (6S Workplace, 2004) yang dimaksud terdiri dari:

1. *Safety* (Keselamatan) – mengidentifikasi dan mengeliminasi kondisi yang kurang aman.
2. *Sorting* (Penyortiran) – mengevaluasi kebutuhan *item-item* yang dibutuhkan pada saat ini dan menyingkirkan yang tidak dibutuhkan.
3. *Setting in Order* (Pengaturan sesuai dengan urutan) – mengatur *item-item* penting dengan susunan dan yang paling logis dan efisien. Pekerjaan ini termasuk pengaturan limit persediaan, membuat indikator lokasi, dan membentuk titik-titik pemesanan ulang.
4. *Shine* – membersihkan seluruh area dan menggunakan pembersih untuk memastikan kebersihan peralatan kantor dan area yang dirawat.
5. *Standardization* (Standarisasi) – menciptakan keseragaman pola kerja dan menggabungkan tiga S yang pertama di dalam rutinitas sehari-

hari melalui tampilan visual, *checklists*, dan pengendalian-pengendalian pada proses.

6. *Sustainment* – menciptakan akuntabilitas untuk untuk melestarikan dan kontinuitas dari sistem 6S melalui disiplin diri, pelatihan, komunikasi, dan keterlibatan karyawan secara total.

Selain penghargaan tersebut, ANCRI juga memperoleh beberapa sertifikasi bertaraf internasional yang sudah menjadi standar bagi setiap unit bisnis di Akzo Nobel Global, seperti:

1. OHSAS (*Occupational Health and Safety Advisory Services*) 18001:2007

Sertifikasi ini membuktikan tanggung jawab ANCRI untuk meminimalisir bahkan menghapuskan resiko bagi para karyawan dan *stakeholder* lainnya, yang berhubungan langsung dengan resiko K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), saat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Organisasi yang mengimplementasikan OHSAS 18001 memiliki struktur manajemen yang terorganisir dengan wewenang dan tanggung-jawab yang tegas, sasaran perbaikan yang jelas, hasil pencapaian yang dapat diukur, dan pendekatan yang terstruktur untuk penilaian resiko. Demikian pula, pengawasan terhadap kegagalan manajemen, pelaksanaan audit kinerja dan melakukan tinjauan ulang kebijakan dan sasaran K3.

(<http://www.nqa.com/in/atozservices/article.asp?SECTION=274&ARTICLE=256>, 2010).

2. ISO 9001:2000 untuk *Quality Management System* (Sistem Manajemen Mutu)

Sistem Manajemen Mutu merupakan kerangka kerja yang disertai dengan prinsip-prinsip dasar yang menggunakan pendekatan manajemen untuk yang dipergunakan sebagai paduan di dalam

melaksanakan aktivitas perusahaan guna mencapai kepuasan optimum bagi para pelanggan.

3. ISO 14001:2004 untuk *Environmental Management System* (Sistem Manajemen Lingkungan)

ISO 14001 adalah standar sistem manajemen utama yang menghususkan pada persyaratan bagi formulasi dan pemeliharaan dari Sistem Manajemen Lingkungan. Tiga komitmen fundamental mendukung kebijakan lingkungan untuk pemenuhan persyaratan ISO 14001, termasuk :

- a. pencegahan polusi
- b. kesesuaian dengan undang-undang yang ada
- c. perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Lingkungan

Adapun manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan CSR di lingkup internal ANCRI adalah:

1. *Brand differentiation*

CSR yang dilakukan ANCRI telah memberikan citra yang positif di mata masyarakat sehingga menciptakan *customer loyalty* yang terbukti telah mampu memperkuat posisi produk-produk ANCRI di pasaran.

2. *Human resources*

Penerapan CSR di lingkungan perusahaan telah mampu meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi para karyawan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. *License to operate*

Izin dan kepercayaan pemerintah serta publik terhadap ANCRI semakin besar setelah ANCRI mampu memenuhi standar operasi,

bahkan yang bertaraf internasional, dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### 4. *Risk management*

Reputasi ANCRI cukup terjaga dengan kepiawaiannya memanejmani resiko-resiko bisnis yang mungkin terjadi, salah satunya dengan memasang papan untuk mencatat jumlah kecelakaan yang terjadi di lingkungan kantor dan pabrik ANCRI yang diletakkan di halaman parkir.

Dari pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR pada dasarnya merupakan strategi perusahaan untuk mengungguli para pesaingnya karena keefektifannya sebagai *promotion tools* dan *public relation*. Sebagaimana diungkapkan oleh Hutomo (2008), CSR dilakukan dengan tujuan awal untuk menumbuhkan kesadaran etis dalam melakukan bisnis dan tidak hanya sekedar memenuhi peraturan. Hal itulah yang selama ini dilakukan oleh ANCRI. Akan tetapi, strategi Akzo Nobel menjadikan CSR sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya ternyata mampu membantu ANCRI meraih kembali kepercayaan konsumen dan menguasai 6% pasar *car refinishes* di asia pasifik.

#### 4.2. **Aktivitas CSR Berupa *Community Development* di Marunda**

*Community development* merupakan bagian dari CSR yang dilakukan dalam bentuk aktivitas sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan. Bentuk aktivitas yang dilakukan biasanya tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan dan harus disesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan perusahaan itu sendiri. Sebagaimana standar Akzo Nobel Global, aktivitas *community development* di ANCRI harus mengikutsertakan para karyawan dengan jumlah dana yang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat serta lingkungan berdasarkan program MDG. Tujuan dari aktivitas

tidak hanya mencakup 3P, tetapi 4P (*People, Planet, Profit, and Pride*). Pada poin *pride*, diharapkan para pihak yang terlibat akan memiliki rasa bangga karena memiliki peran di dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan.

Bentuk *community development* yang dilakukan oleh ANCRI yang dapat dikatakan berhasil adalah program “*Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda*” yang ide awalnya berasal dari salah satu karyawan ANCRI. Keberhasilan program *community development* ini dibuktikan dengan memperoleh predikat sebagai *Best Corporate Sustainability for Community Development* dari ICSA pada tahun 2009.

Adapun sumber pendanaan yang diperoleh untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas *community development* berasal dari Akzo Nobel Global yang berada di Belanda. Setiap tahun Akzo Nobel Global memberikan dana sekitar dua miliar rupiah kepada unit-unit bisnisnya yang berada di Indonesia. Dengan dana tersebut, ANCRI, yang merupakan salah satu unit bisnis Akzo Nobel di Indonesia, harus pandai-pandai memamanajementi dana yang ada sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat dan lingkungan secara optimal. Bentuk aktivitas yang dilakukan pun harus sesuai dengan standarisasi, persetujuan, dan dilaporkan secara langsung ke Akzo Nobel Global untuk dikonsolidasikan.

#### **4.2.1. Kondisi Umum Marunda**

Lokasi Pantai Marunda membentang sepanjang 1.7 km di wilayah Cilincing, Jakarta Utara dan berjarak sekitar 10 km dari lokasi ANCRI. Wilayah ini merupakan satu-satunya pantai yang terbuka untuk umum di wilayah Jakarta. Akan tetapi aksesibilitas menuju Marunda dapat dikatakan cukup sulit dan terpencil. Padahal di wilayah ini pulalah berdiri tempat bersejarah yang disebut Rumah Si Pitung yang didirikan pada awal abad ke-20.

Dengan total 600 keluarga, mayoritas warga Marunda bekerja dan mengantungkan hidup dari hasil laut dengan pemasukan rata-rata kurang dari €7

(Rp 105.000,- jika kurs €1 = Rp 15.000) per keluarga per hari. Kondisi warga Marunda semakin memprihatinkan dengan tidak memadainya sarana kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, kebersihan individu, dan sanitasi. Bangunan sekolah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, keterbatasan air bersih, tempat tinggal yang hanya terbuat dari kayu lapis dan tanah liat sebagai lantainya, dan pada umumnya tempat tinggal penduduk cenderung tidak memiliki sarana sanitasi. Jalan pun penuh lumpur dan berbau amis serta dipenuhi dengan sampah. Lingkungan dengan kondisi seperti ini tentunya akan sangat rentan dengan penyakit.

Melihat kondisi masyarakat maupun lingkungan yang seperti ini, maka mustahil jika *community program* yang dilakukan hanya bersifat “*one shot*”. Program ini harus dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan jika ingin mendapatkan hasil yang optimal.

#### **4.2.2. Perumusan Program**

Di dalam merumuskan program *community development* di Marunda, ANCRI cenderung mengarah pada pertahapan yang diungkapkan oleh Suharto (2008). Adapun penjabaran perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. *Engagement***

Pada tahap ini ANCRI melakukan pendekatan awal kepada pihak-pihak yang berwenang – lurah, ketua RT, ketua RW, dan ketua nelayan di wilayah Merunda – guna mengetahui aspek legalitas kependudukan dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan di Marunda. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pada titik ini ANCRI juga melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat Marunda guna mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya agar terjalin pemahaman, penerimaan, dan *trust* masyarakat yang cukup sulit untuk diperoleh.

Tahap ini dapat dilalui oleh ANCRI dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya hubungan dan komunikasi yang cukup baik antara perwakilan masyarakat Marunda dengan ANCRI, walaupun tidak ada lagi perwakilan ANCRI yang melakukan pendampingan atau evaluasi secara langsung ke Marunda sejak tahun 2009.

## 2. *Assessment*

Langkah selanjutnya pihak ANCRI melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui FGD (*Forum Group Discussion*) secara lebih mendalam untuk dijadikan dasar pijakan di dalam merumuskan program yang akan dilaksanakan. Pada langkah ini pihak ANCRI menemukan bahwa sebagian besar penduduk Marunda hidup di bawah garis kemiskinan dan dengan fasilitas hidup yang sangat tidak memadai.

Pada tahap ini standarisasi yang dipergunakan oleh ANCRI adalah MDG (*Millenium Development Goals*) dikarenakan adanya kesesuaian dengan target yang ingin dicapai dan tujuan jangka panjang ANCRI untuk membantu pemerintah memperbaiki taraf hidup masyarakat serta turut andil di dalam penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, penggunaan standar MDG juga dilakukan karena merupakan standar utama yang ditetapkan oleh Akzo Nobel Global di dalam melakukan aktivitas *community development*.

## 3. *Plan of Action*

Setelah melalui dua tahap sebelumnya, ANCRI mulai menyusun rencana aktivitas dengan menyesuaikan anatara kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh ANCRI dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan akan misi yang akan dilaksanakan dapat berjalan beriringan dan memenuhi aspirasi masyarakat (*stakeholders*)



dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan termasuk para *shareholder*.

Mekanisme penerapan program yang dilakukan secara *partisipatif* dengan melakukan FGD (*Forum Group Discussion*). Mekanisme ini dilakukan agar aktivitas yang dilakukan kelak tidak hanya berbentuk *phylantrophy* dan terkesan hanya memenuhi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Akan tetapi, mekanisme ini memfasilitasi *beneficiaries* untuk bersama-sama merancang program yang memang benar-benar dibutuhkan dan mampu memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan.

#### 4. *Action and Facilitation*

Setelah perencanaan matang, program dilaksanakan dengan bekerjasama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dan didukung oleh instansi pemerintah. Selain itu, dukungan penuh pun datang dari lembaga pemerintah, mitra usaha, serta masyarakat Marunda sendiri. Pada tahap ini, pelaksanaan harus benar-benar memperhatikan prinsip *Triple Bottom Line*. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan (ANCRI), dan LSM (IPB) harus terjalin secara sinergis karena antara satu pihak dengan yang lainnya.

#### 5. *Evaluation and Termination of Remormation*

Setelah pelaksanaan aktivitas *community development* dilaksanakan, maka evaluasi atas hasil program yang dijalankan pun dilakukan. Hal ini guna mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dan efektivitas dari aktivitas yang dilaksanakan. Evaluasi sampai saat ini masih tetap dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan ketua nelayan Marunda, Bapak Suaeb Mahbub. Ketua nelayan Marunda mengatakan bahwa komunikasi terakhir dilakukan pada bulan Mei 2010 antara ketua nelayan Marunda dengan penganggung jawab

aktivitas *community development* di Marunda (komunikasi pribadi, 11 Juni 2010).

Program *community development* ANCRI di Marunda diakhiri dengan *exit strategy* berupa TOT (*Training of Trainers*) sehingga masyarakat dapat melanjutkan program ini secara mandiri. Strategi TOT dapat dilakukan jika pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sesuai pola pikir dan gaya hidup komunitas yang bersangkutan dan dapat memancing daya kreativitas serta kemauan masyarakat di komunitas tersebut untuk terus mengembangkan diri.

#### 4.2.3. Pelaksanaan Program

Program *Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda* dimulai pada tanggal 30 Agustus tahun 2008. Peresmian program ini dilakukan oleh Direktur Utama ANCRI, Bapak Sri Aditia, dan dihadiri oleh walikota Jakarta Utara. Pelaksanaan program *community development* ini melibatkan hampir seluruh karyawan ANCRI, mulai dari direktur utama, staf keuangan, operator produksi, sampai *office boy* ikut ambil bagian didalamnya.

Pelaksanaan program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan dibagi menjadi tiga bagian dan dilakukan mulai pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2008. Tiga bagian program yang dimaksud berdasarkan laporan hasil aktivitas di Marunda antara lain:

1. Bagian pertama adalah "Pemberdayaan" yang melibatkan para karyawan ANCRI dan IPB yang merupakan institut yang memiliki reputasi internasional dalam ilmu pertanian dan perikanan. Tujuan dari "Pemberdayaan" ini adalah membina hubungan secara langsung dengan para nelayan setempat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam menangkap ikan. Untuk mengetahui permasalahan yang

dihadapi oleh para nelayan maka diadakan diskusi kelompok. Setelah permasalahan diketahui, langkah selanjutnya adalah pelatihan untuk pengelolaan masalah perikanan yang dilakukan oleh para ahli dari IPB dengan difasilitasi oleh ANCRI. Pemberdayaan untuk intensifikasi dan *extensiveness* dari teknologi penangkapan ikan juga dilakukan, termasuk sumbangan alat pancing yang memadai. ANCRI juga memfasilitasi para nelayan dengan membangun perusahaan penangkapan ikan independen yang dimiliki oleh komunitas nelayan setempat sebagai media untuk bekerja sama terkait dengan masalah perikanan.

2. Bagian kedua adalah "Perbaikan Lingkungan dan Fasilitas Umum" yang dirancang untuk memulihkan kondisi sosio-ekonomi yang dilakukan dengan bergotong royong. Para karyawan ANCRI dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang akan datang ke Marunda bergantian setiap minggunya untuk secara bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan perbaikan dan pembangunan di wilayah tersebut. Sebuah dermaga kecil dari beton juga dibangun di pantai Marunda dengan harapan akan menarik banyak peminat untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah tersebut sehingga akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Selain pembangunan dermaga, para karyawan ANCRI dan masyarakat juga bergotong royong untuk melakukan pengecatan bangunan sekolah dan membuka perpustakaan umum. Selama program berlangsung, secara keseluruhan telah ditanam 200 pohon di sepanjang kawasan perumahan. Sementara para orang tua bekerja sama dengan para karyawan ANCRI, anak-anak mereka dikumpulkan dan diajak oleh para karyawan ANCRI untuk melakukan permainan yang mendidik. Selain pembangunan dan perbaikan, ANCRI juga mendonasikan buku-buku, alat-alat bantu mengajar, dan *furniture* untuk mendukung aktivitas belajar mengajar.

3. Pada akhir program, seluruh karyawan ANCRI, yang ikut andil di dalam program *community development* di Marunda, datang ke lokasi untuk melaksanakan program pemulihan prasarana jalan dengan menggunakan *paving block*.

Selain itu dengan dibantu oleh koordinator masyarakat (kepala nelayan Marunda), Bapak Suaeb Mahbub, berdirilah sebuah koperasi bernama Mina Marunda. Koperasi ini didirikan untuk mengelola dana yang didonasikan sebagai *working capital* bagi para nelayan dan membangun *floating unit* sebagai *logistic stocking point* agar para nelayan tidak perlu kembali ke rumah dan membuang waktu untuk mengambil kebutuhan untuk menangkap ikan lagi. Selain itu, melalui koperasi ini, kualitas hasil *community product* dapat ditingkatkan sehingga dapat dijual di toko-toko modern. Acara penutupan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2008 dengan dihadiri oleh para pejabat dari dinas Perikanan dan Jakarta Utara.

#### **4.2.4. Kendala yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya**

Kendala yang dihadapi ANCRI pada saat pelaksanaan, sebelum, dan sesudah program *Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda* lebih banyak mengarah pada permasalahan yang berasal dari pihak ketiga. Sebut saja birokrasi yang cenderung berbelit-belit sehingga ANCRI sempat mengalami kesulitan untuk memperoleh izin untuk pelaksanaan program dan adanya *conflict of interest* dari pihak-pihak yang ingin terlibat di dalam program ini dan cenderung mengabaikan tujuan awal program.

Kesulitan di dalam mencari mitra yang sejalan dengan harapan dan tujuan program yang telah dirumuskan pun menjadi kendala. Hal ini terutama disebabkan besarnya *cost* yang harus dikeluarkan untuk membayar para ahli dari instansi yang bersangkutan.

Masalah pun sempat muncul dikarenakan sulitnya menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada masyarakat Marunda. Masalah ini timbul disebabkan seringnya lokasi ini menjadi sasaran aktivitas sosial yang kurang mendidik, seperti pemberian hibah yang tidak terorganisir dengan baik, dan bersifat “*one shot*”. Selain itu, tidak adanya pemimpin masyarakat independen yang disegani menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

Suatu masalah jika dibiarkan tanpa adanya solusi tentu akan tetap menjadi masalah dan akan semakin membesar. Pemikiran itu membuat ANCRI segera mencari formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Langkah untuk mengatasi permasalahan diawali dengan mengirimkan utusan yang diberi tugas untuk membaur dengan masyarakat setempat guna memperoleh informasi yang tepat dan terjamin kebenarannya. Pada awalnya hal itu sulit untuk dilakukan karena adanya kecenderungan para penduduk yang kurang mempercayai masuknya pihak asing ke komunitas mereka. Namun pada akhirnya informasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi masyarakat dan lingkungan sebagai modal dasar untuk melanjutkan program ke tahap selanjutnya dapat diperoleh.

Berdasarkan informasi yang telah diterima, ANCRI berhasil melakukan adaptasi sehingga pada akhirnya salah seorang pemimpin masyarakat di lingkungan tersebut, yang cukup disegani dan memiliki reputasi yang baik, dan dipilih masyarakat setempat untuk mengkoordinasikan mereka sehingga program dapat dijalankan. Pencarian mitra yang sesuai pun bukan perkara mudah. IPB dipilih karena instansi tersebut memiliki para ahli di bidang lingkungan dan perikanan.

#### 4.2.5. Manfaat yang Dirasakan

Suatu aktivitas tidak mungkin dilaksanakan jika tidak mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula program *community development* yang dilaksanakan oleh ANCRI di Marunda. Banyak manfaat yang dirasakan oleh ANCRI, sebagai instansi, dan para karyawan sebagai individu-individu yang terlibat. Manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Semakin meningkatnya solidaritas dan kerja sama yang baik antar karyawan ANCRI.
3. Terbentuknya citra positif yang lebih baik di mata masyarakat terhadap ANCRI.
4. Dianugerahinya koordinator dan pemimpin masyarakat Marunda, Bapak Suaeb Mahbub, sebagai Pemuda Pelopor 2009 untuk Provinsi Jakarta (Lampiran 1) karena kesuksesannya membangun komunitasnya tentu membawa nama ANCRI ke kancah nasional bahkan internasional sehingga *goodwill* ANCRI pun secara otomatis meningkat. Dalam hal ini, manfaat CSR dari sisi *brand differentiation* juga dapat diperoleh.

Sementara bagi para masyarakat Marunda, manfaat yang mereka peroleh adalah:

1. Memperoleh pengetahuan mengenai kewirausahaan sehingga pada saat musim paceklik masyarakat Marunda tetap dapat berkarya.
2. Perbaikan-perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh ANCRI bersama masyarakat Marunda mampu mengurangi kesan kumuh dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

3. Kepedulian ANCRI mampu menggerakkan banyak pihak untuk lebih peduli dan datang mengunjungi wilayah Marunda untuk memberikan bantuan.

#### **4.2.6. Kondisi Marunda Paska *Community Development* ANCRI**

Keberhasilan ANCRI memperoleh penghargaan dari INA serta terpenuhinya indikator keberhasilan aktivitas CSR dari Akzo Nobel Global menyebabkan program *Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda* dianggap berhasil oleh pihak ANCRI. Selain itu, indikator keberhasilan dari sisi perusahaan juga didapat dari citra perusahaan yang semakin baik di mata masyarakat yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya nilai penjualan produk-produk ANCRI yang kini mampu menembus pasar Asia Pasifik. Dari sisi masyarakat, hasil aktivitas CSR dapat meningkatkan kualitas hidup. Hal ini pada awalnya terpenuhi oleh ANCRI. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin longgarnya pengawasan serta evaluasi yang dilakukan ANCRI terhadap aktivitas CSR yang pernah dilaksanakan di Marunda, membuat hasil positif yang telah diperoleh mengalami penurunan. Kondisi lingkungan dan masyarakat Marunda pada awalnya mengalami peningkatan yang cukup baik, namun perlahan mengalami penurunan.

Masalah yang muncul pertama kali datang dari pengelolaan Koperasi Mina Marunda yang para pengurusnya ternyata harus memiliki sertifikasi kepengurusan koperasi. Hal ini menyebabkan aktivitas dan fungsi koperasi tersebut pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Padahal jika saja pada saat koperasi didirikan para pengurusnya diberikan pendampingan serta pendidikan sehingga mereka memperoleh sertifikasi kepengurusan koperasi, maka kemungkinan tidak berjalannya fungsi koperasi dapat diminimalisir. Saat ini bangunan koperasi tersebut mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.

Kondisi penduduk Marunda pun mengalami kemerosotan paska program CSR. Perda no.08 tahun 2007 tentang ketertiban umum, yang pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah Jakarta Utara dilakukan berkenaan dengan perayaan “100 Hari Program Kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” menjadi salah satu penyebab masyarakat Marunda kehilangan mata pencahariannya. Sejak penertiban tersebut dilaksanakan, masyarakat Marunda yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tidak lagi diperbolehkan untuk menambatkan perahu mereka di muara sungai sehingga perahu mereka mengalami kerusakan saat musim angin barat. Selain itu, mayoritas keramba apung milik para nelayan pun rusak akibat adanya penertiban saat akan diadakan perayaan “100 Hari Program Kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” (Lampiran 2, Permohonan Pembinaan Sebagai Solusi atas Kerugian Akibat Perda no.08 tahun 2007).

Tidak adanya peraturan yang tegas mengenai pembuangan limbah menyebabkan para nelayan tidak dapat lagi menangkap ikan karena tercemarnya air laut hingga jarak 1-2 mil dari pesisir pantai. Para nelayan pun tidak boleh lagi menggunakan sero sebagai alat pengangkap ikan karena dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak indah oleh pemerintah daerah setempat.

Aktivitas *community development* dianggap berhasil jika dilakukan secara berkesimbangan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya, memiliki tujuan untuk memperbaiki, fokus pada pemberdayaan potensi-potensi masyarakat, dan menekankan pada prinsip kemandirian. Jika aspek berkesinambungan tidak terpenuhi, maka efeknya akan dirasakan pada tujuan memperbaiki, pemberdayaan potensi-potensi masyarakat, dan prinsip kemandirian. Hal ini disebabkan tujuan utama *community development* adalah memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh, sehingga di dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang berkesinambungan guna memantau perkembangan yang terjadi.

Selain itu, yang juga harus diingat oleh perusahaan yang melakukan aktivitas CSR, keberhasilan pelaksanaan aktivitas CSR pun harus disokong oleh



kerjasama yang sinergis antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah setempat. Pada sisi kerjasama yang sinergis dengan pihak pemerintah daerah setempat, ANCRI dapat dikatakan kurang berhasil. Perda no.08 tahun 2007 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta Utara pasca aktivitas CSR di Marunda menjadikan keberhasilan aktivitas CSR yang mengarah pada pendidikan kelautan yang telah dilaksanakan tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya. Kondisi ini tentu mempengaruhi aspek-aspek lainnya di dalam aktivitas CSR yang berbentuk *community development* yang telah dilaksanakan.

Akan tetapi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh ANCRI yang tidak terbatas pada bidang perikanan dan kelautan tetapi juga pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Hal tersebut membuat kemadirian masyarakat serta kemauan untuk terus mencari jalan keluar dari masa paceklik yang berkepanjangan semakin besar. Dengan berbekal mesin dan modal serta limbah produksi di sekitar wilayah Marunda, masyarakat membuat alas kaki serta tambang untuk disulamkan ke jaring pancing yang mereka jual ke wilayah sekitar Marunda dan ke kampung-kampung nelayan lainnya.

#### **4.3. Kesesuaian Aktivitas CSR di ANCRI dengan Program MDG (*Millenium Development Goals*)**

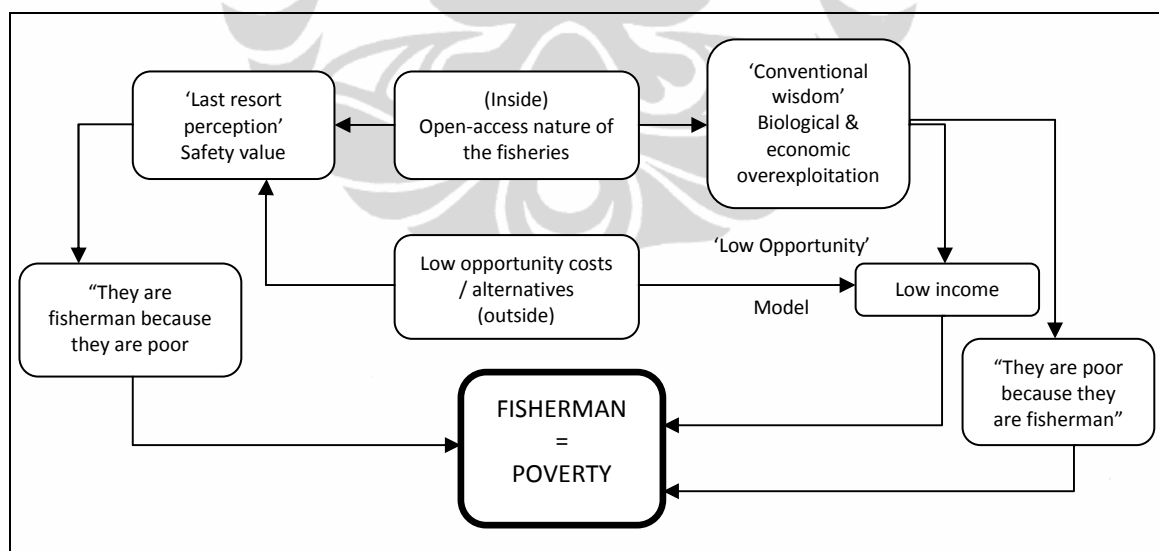
Aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan ANCRI pada dasarnya sejalan dengan program MDG sebagaimana standarisasi Akzo Nobel Global. Selain itu, tujuan jangka panjang dari aktivitas CSR di ANCRI adalah membantu pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat serta berkualitas sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Juliansyah selaku *Manager QHSE (Quality, Health, Savety, and Environment)* di ANCRI.

Dalam melakukan aktivitas CSR yang berdasarkan pada MDG dibutuhkan sinergi antara pihak perusahaan (ANCRI), pemerintah, dan LSM. Keterkaitan

antara satu dengan yang lainnya sangat erat. Perusahaan sebagai pemilik modal membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah dan masyarakat agar program CSR yang dicanangkannya dapat berjalan. Pemerintah membutuhkan perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan program MDG yang sudah menjadi komitmennya. Sementara masyarakat membutuhkan bantuan baik dari pemerintah maupun perusahaan. Selain itu, masyarakat pun dibutuhkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menggerakkan program yang telah dicanangkan.

Untuk program CSR yang dilakukan di Merunda, tujuan MDG yang dijadikan fokus dan dasar pelaksanaan program adalah tujuan MDG yang pertama, menghapuskan tingkat kemiskinan. Program CSR yang difokuskan pada tujuan MDG yang pertama dilakukan karena terdapat paradigma yang nyata bahwa hidup di daerah pesisir sebagai nelayan sama artinya dengan kemiskinan, sebagaimana digambarkan oleh Bene (2003) di dalam bukunya *“When Fishery Rhymes with Poverty.”*

**Gambar 4.1.**  
*When Fishery Rhymes With Poverty*



Sumber: Bene, C. 2003. When fishery rhymes with poverty (Vol. 31 No. 6): 9575, Mei 2010

Dari gambar di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa seorang individu memilih profesi sebagai nelayan karena tidak adanya pilihan lain serta

terbatasnya kesempatan. Kenyataan inilah yang menjadi dasar pemikiran awal ANCRI untuk menyusun program-program serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat Marunda.

Hal utama yang dilakukan oleh ANCRI pada saat pelaksanaan program adalah mengubah pola pikir masyarakat dari “*no fish no income*” menjadi “*no fish, find a way out to get another income*”. Ternyata hal tersebut cukup sulit diterapkan pada awalnya, sebagaimana diungkapkan oleh kepala nelayan Marunda, Bapak Suaeb Mahbub. Akan tetapi dengan bimbingan serta pendampingan selama beberapa bulan, usaha tersebut membuahkan hasil.

Pola pikir masyarakat yang mulai berubah ternyata juga meningkatkan daya kreativitas dan kemauan belajar masyarakat Marunda. Di saat paceklik seperti sekarang, dengan mesin dan modal yang ada, masyarakat mampu menciptakan suatu inovasi dan produk yang memiliki nilai jual. Namun karena tidak adanya lagi pendampingan serta evaluasi secara langsung dari pihak ANCRI serta kurangnya permodalan, menyebabkan kreativitas tersebut cenderung tidak dapat berkembang.

Jika diperhatikan, 8 tujuan MDG memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan satu tujuan dapat mendorong berjalannya tujuan-tujuan lainnya. Diawali dari pengentasan kemiskinan yang akan mempengaruhi pencapaian pendidikan dasar yang universal, mengembangkan kesetaraan gender, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap penyakit, menjamin berlanjutnya pengembangan lingkungan, mengembangkan kemitraan global, dan pada akhirnya kembali lagi ke tujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pendidikan, aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI di Marunda adalah dengan melakukan PAUD (Pendidikan Usia Dini), pembangunan perpustakaan serta perbaikan fasilitas sekolah dan mendonasikan buku-buku. Aktivitas ini dilakukan dengan harapan proses belajar mengajar dapat berjalan

dengan lebih baik sehingga tujuan MDG yang ke-2, pencapaian pendidikan dasar secara universal baik untuk anak lelaki maupun perempuan, dapat tercapai. Jika tujuan yang ke-2 berjalan, maka diharapkan efeknya dapat dirasakan ke tujuan MDG yang ke-3, mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

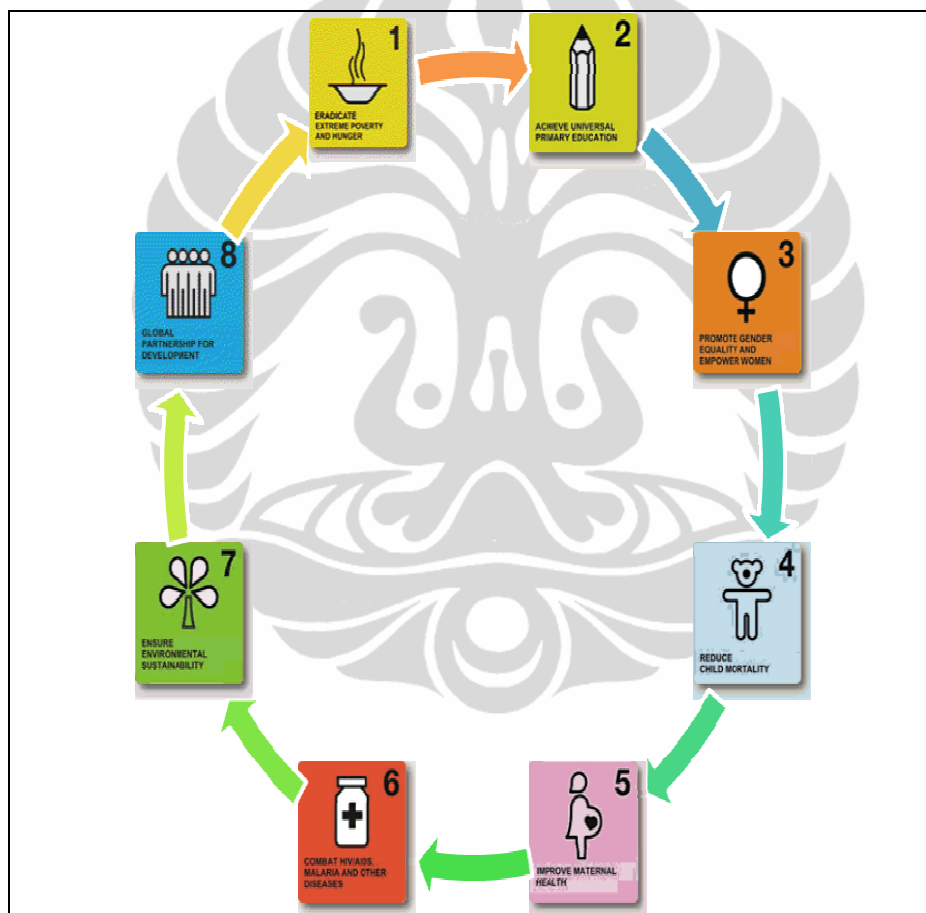
Sebagaimana diketahui, kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan belum seluas kaum lelaki. Dengan adanya tujuan MDG yang ke-3, diharapkan kaum perempuan pun dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum lelaki di dalam pendidikan dan kesempatan kerja. Khusus di wilayah Marunda, pelaksanaan tujuan MDG yang ke-3 dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai cara pembuatan terasi agar kaum perempuan di wilayah tersebut dapat ikut berkontribusi di dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Selain itu, pengetahuan mengenai kesehatan dan kebersihan serta sanitasi pun diberikan kepada mereka yang pada akhirnya akan mengarahkan kepada tujuan MDG yang ke-4, ke-5, dan ke-6 yakni mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan perlawanan terhadap penyakit.

Untuk tujuan MDG yang ke-7, menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan, ANCRI tidak melakukannya secara mendetail sebagaimana tujuan MDG yang dicanangkan. Pada tujuan MDG ke-7 ini, ANCRI melakukan penanaman 200 pohon yang diharapkan akan mendorong kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan pada setiap pribadi yang terlibat di dalam aktivitas CSR ini. Tujuan MDG yang ke-7 ini dilakukan mengingat mata pencaharian dari masyarakat Merunda bersentuhan secara langsung dengan alam dan lingkungan sekitarnya dan bahkan lokasi tempat tinggal mereka pun pada dasarnya memiliki potensi wisata alam yang cukup besar.

Pada tujuan MDG yang ke-8, aktivitas dilakukan dengan membangun koperasi Mina Marunda yang bertujuan untuk memanejemeni *working capital* yang disalurkan oleh ANCRI serta diharapkan akan membuat perekonomian yang

berjalan di wilayah Marunda dapat berjalan dengan lebih efisien. Koperasi ini diharapkan akan mampu menjadi inti dari perputaran perekonomian yang ada di wilayah Marunda sehingga tujuan MDG yang ke-1 pun dapat tercapai. Akan tetapi disebabkan pengelolaan koperasi yang tidak sesuai prosedur dan pengurusnya tidak memiliki sertifikasi kepengurusan koperasi, maka koperasi ini pun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

**Gambar 4.2.**  
**Keterkaitan antara Tujuan-Tujuan MDG**



Sumber: [http://www.humanitad.org/network/mdg\\_network/](http://www.humanitad.org/network/mdg_network/), dengan pengolahan dari penulis,  
Juni 2010

#### 4.4. Pelaporan CSR di ANCRI

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan (Suharto, 2008). Evaluasi CSR yang dilakukan oleh ANCRI dilakukan per tiga bulan (*quarterly*). Akan tetapi evaluasi difokuskan pada aktivitas *community development*. Sementara untuk aktivitas CSR selain *community development*, dilakukan seiring dengan aktivitas operasional lainnya di ANCRI.

Pelaporan atas aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI masih berupa narasi yang dilaporkan kepada Akzo Nobel pusat di Belanda (Lampiran 3, Contoh Laporan CSR ANCRI). Hal ini dilakukan karena sistem bisnis unit yang dianut oleh Akzo Nobel membuat segala aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit bisnis mau tidak mau harus mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh Akzo Nobel pusat. Selain itu, ANCRI pun belum memiliki divisi khusus untuk menangani CSR di perusahaan tersebut, sehingga laporan CSR (*Sustainability Report*) dirasa belum dibutuhkan. Sementara Laporan CSR di Akzo Nobel Global sudah mengikuti standarisasi dari GRI. Pembuatan laporan nampaknya cenderung dikarenakan alasan *reputation driven* dan *trust driven*. Alasan ini disebabkan reputasi positif yang telah dimiliki oleh Akzo Nobel Global dan telah terbentuknya kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

Akan tetapi, dari hasil wawancara (Lampiran 4) yang dilakukan dengan Bapak Juliansyah, *Manager QHSE*, tidak tertutup kemungkinan akan dibentuk divisi khusus CSR yang mempersatukan dan mengurus segala aktivitas CSR yang dilakukan oleh unit-unit bisnis Akzo Nobel di Indonesia. Bapak Sri Aditia, Direktur Utama ANCRI, menyatakan bahwa jika pada akhirnya divisi yang menangani CSR dibentuk, maka salah satu fungsinya adalah bertanggung jawab untuk membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Akan tetapi, pembentukan divisi khusus CSR baru dapat dilakukan jika terdapat *share* saham Akzo Nobel Global yang dimiliki oleh pihak Indonesia (Pernyataan ini sangat wajar mengingat di PSAK no.1 (paragraf 09) pun menyatakan bahwa

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”, yang disimpulkan bahwa laporan ini tidak diwajibkan dibuat selama dianggap tidak perlu.

Jika laporan CSR yang dipublikasi oleh ANCRI masih berupa narasi, lain halnya dengan laporan yang terkait dengan masalah keuangan baik operasional maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Untuk laporan yang terkait dengan masalah keuangan, sebagaimana dinyatakan di dalam *Code of Conduct Akzo Nobel*, harus dicatat sesuai standar perusahaan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta hukum yang berlaku di negara tempat bisnis unit Akzo Nobel berdiri. ANCRI sebagai bagian dari Akzo Nobel Global pun secara tidak langsung terikat dalam *Code of Conduct Akzo Nobel* dan memiliki kewajiban untuk *men-disclose* laporan-laporannya. Berdasarkan *Akzo Nobel Policy on Auditor Independence Services to be provided by the External Auditors* (Lampiran 5), auditor independen yang melakukan audit di Akzo Nobel harus independen sebagaimana ditetapkan oleh *the Dutch regulations as revised by The Dutch Royal Institute of Registered* dan *the European Commission Recommendation on Statutory Auditor's*.

Dari penjabaran pada paragraf-paragraf sebelumnya, terlihat bahwa ANCRI harus mengikuti aturan, standar, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal pembuatan laporan. Akan tetapi tidak terdapat kewajiban bagi ANCRI untuk melakukan *disclosure* terhadap laporan-laporan tersebut tersebut mengingat ANCRI merupakan bagian dari Akzo Nobel Global yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak Indonesia.

## BAB 5

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa CSR yang ada di ANCRI lingkungannya tidak hanya terbatas pada *community development* sebagaimana umum terjadi pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Bagi ANCRI, CSR telah menjadi filosofi yang menyatu dengan segala bentuk aktivitas di perusahaan. Hal yang paling jelas dapat terlihat dari sistematika pembangunan pabrik ANCRI di Pulo Gadung yang benar-benar memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan. *Community development* yang dilakukan ANCRI di Marunda berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan di berbagai sisi. Kelemahan utama dari aktivitas yang dilakukan di Marunda adalah kurangnya kerja sama yang sinergis antara ANCRI dengan Pemerintah Daerah Jakarta Utara sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat Marunda kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Selain itu kelemahan lain terlihat pada sisi evaluasi yang hanya dilakukan via telepon tanpa adanya kunjungan langsung ke lokasi. Akan tetapi di balik kelemahan-kelemahan tersebut, ANCRI telah mampu mendorong dan mendidik masyarakat Marunda sehingga mereka mampu mencari solusi untuk mengatasi segala keterbatasan mereka di masa paceklik. Dalam hal ini *sustainability* dari program yang dilaksanakan dapat dikategorikan kurang berhasil karena pendampingan dan evaluasi serta pengawasan aktivitas yang telah dilaksanakan belum dilakukan secara optimal.

Program MDG pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal itu rupanya disadari oleh ANCRI. Dengan mengawali tujuan CSR yang difokuskan untuk memberantas kemiskinan, ANCRI secara tidak langsung telah merambah ke tujuan-tujuan lain dari program MDG. Adapun alasan ANCRI menjadikan MDG sebagai dasar dari pelaksanaan



programnya di Marunda adalah keinginan ANCRI untuk berperan aktif di dalam membangun Indonesia dan dikarenakan Akzo Nobel Global pun berpegang pada prinsip MDG saat melaksanakan aktivitas CSR-nya. Adapun aktivitas-aktivitas seperti pendidikan dan pelatihan mengenai kelautan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Marunda, pembangunan sanitasi yang memadai, serta pembangunan perpustakaan umum dan Koperasi Mina Marunda merupakan sebagian dari aktivitas CSR yang berdasarkan MDG yang dilakukan oleh ANCRI di Marunda.

Untuk pelaporan CSR, ANCRI membuatnya dalam bentuk narasi yang dilaporkan secara langsung ke Akzo Nobel Global di Belanda untuk dikonsolidasikan, sebab segala bentuk aktivitas ANCRI masih terpusat di Akzo Nobel Global. Selain itu, ANCRI belum memiliki divisi khusus yang menangani masalah CSR dan belum ada *share* saham Akzo Nobel Global yang kepemilikannya berada di Indonesia. Adapun pelaporan yang terkait dengan masalah keuangan, termasuk pendanaan CSR, pertanggungjawabannya dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, tempat ANCRI melaksanakan aktivitasnya, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan di dalam *Akzo Nobel Policy on Auditor Independence Services to be Provided by the External Auditors*. Sementara sebagaimana ditetapkan di dalam *Code of Conduct Akzo Nobel*, ANCRI harus memegang prinsip keterbukaan (*disclosure*).

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka saran-saran berikut diharapkan akan memberikan manfaat bagi ANCRI maupun pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pelaksanaan CSR hendaknya dilakukan dengan lebih mendetail dengan kerja sama yang solid dan sinergis dengan pihak-pihak lain

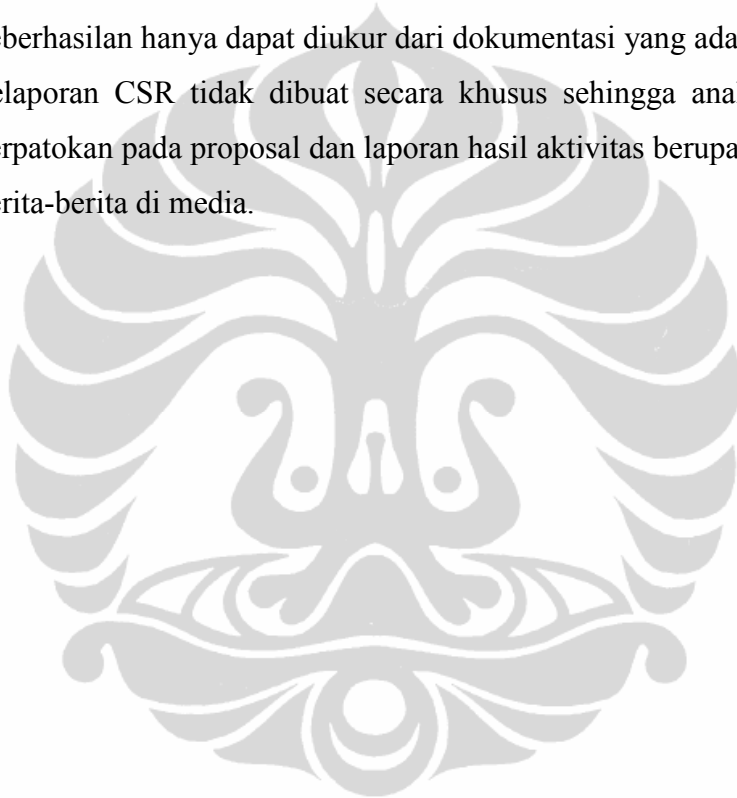
yang terlibat di dalamnya, terutama dengan pihak pemerintahan setempat.

2. *Maintanance* atas hasil pelaksanaan CSR sebaiknya tetap dilakukan sebagai wujud komitmen *sustainability* agar masyarakat setempat tetap terbantu dan lingkungan yang telah dipulihkan akan tetap terjaga kelestariannya.
3. Pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkala di lokasi pelaksanaan CSR (*community development*) sebaiknya dilakukan secara berkala, sehingga tujuan awal dari dilakukannya program tersebut memperoleh hasil yang nyata dan berkesinambungan.
4. Pelaksanaan program yang berkenaan dengan MDG hendaknya dilakukan dengan lebih fokus ke satu tujuan tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.
5. Pelaporan CSR (*Sustainability Report*) ada baiknya juga dibuat sendiri oleh ANCRI mengikuti standar pelaporan Akzo Nobel pusat untuk bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi di masa-masa yang akan datang.
6. Pembentukan divisi yang khusus menangani masalah CSR akan sangat membantu karena akan dapat membuat pelaksanaan aktivitas CSR lebih terorganisir dan terfokus, terutama pada aktivitas *community development*, sehingga pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan audit aktivitas dapat dilakukan dengan lebih baik oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

### 5.3. Kelemahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal baik disengaja maupun tidak. Begitu pula halnya dengan penelitian ini. Kelemahan-kelemahan dari penelitian ini adalah:

1. Waktu penelitian dilakukan tidak bersamaan dengan aktivitas CSR yang dilaksanakan sehingga analisis hanya dilakukan berdasarkan data dan dokumentasi yang diberikan oleh ANCRI dan media-media lainnya serta *site visit* .
2. Tidak semua data dan dokumentasi dapat diungkapkan karena adanya kebijakan perusahaan.
3. Pelaksanaan CSR dalam bentuk *community development* yang bersifat *sustain* baru dilaksanakan untuk pertama kalinya, sehingga standar keberhasilan hanya dapat diukur dari dokumentasi yang ada.
4. Pelaporan CSR tidak dibuat secara khusus sehingga analisis hanya berpatokan pada proposal dan laporan hasil aktivitas berupa narasi dan berita-berita di media.



## DAFTAR REFERENSI

- Abd., Achmad Ridwan. (2007). *Konsep Kedermawanan Korporasi Bisnis*. (<http://ima-unhas.com/index.php/resensi/23-konsep-kedermawanan-korporasi-bisnis.html>)
- Bene, C. (2003). *When Fishery Rhymes with Poverty*. (Vol. 31 No. 6): 9575.
- Creffier, Matias. (2007). *Development: 'MDG Scan' to Benchmark Private Contribution*. Inter Press Service [IPS News].
- Darwin, Ali. (2006). *Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia*. *Economics Business and Accounting Review*, III, 89.
- Elkington, John. (1998). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Hasibuan, Chrysanti & Sedyono. (2006). *CSR Communications: A Challenge on It's Own*. *Economics Business and Accounting Review*, III, 73.
- Hidayat, Hendi. (2009). *CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep*. (<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.html>)
- Hutomo, YB. Sigit. (2008). *Strategi Memenangkan Kompetisi*. (<http://www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=12>)
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per September 2007*, Jakarta : Salemba Empat.

Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Kurniawan, Endang. (2009). *Corporate Social Responsibility “Harmonisasi Si Kumbang dan Si Kembang*.  
(<http://www.iec.co.id/artikel/corporate-social-responsibility-harmonisasi-si-kumbang-dan-si-kembang>)

Laporan Aktivitas CSR PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia di Marunda

Pambudi, Teguh Sri. (2006). *CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian*.  
*Economics Business and Accounting Review*, III, 9.

Siwi, Mahmud. (2008). *Definisi Community Development*.  
(<http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development/>)

Slide presentasi PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia

Suharto, Edi. (2008). *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*. Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008.

Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Zaelani, Muhammad Asep. (2007). *Implementasi CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.  
(<http://hauzah.wordpress.com/2007/10/02/implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakat-miskin/>)

<http://www.akzonobel.com>

<http://asprosbinareka.com/info.php?act=artDet&id=121>

<http://www.ina.or.id/inaweb/>

<http://www.nqa.com/in/atozservices/article.asp?SECTION=274&ARTICLE=256>





**LAMPIRAN 1**

**PETIKAN KEPUTUSAN MENPORA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA BAPAK SUAEB MAHBUB SEBAGAI PEMUDA PELOPOR TAHUN 2009**



MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 0405 TAHUN 2009

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI SUMPAH PEMUDA KE-81  
TAHUN 2009

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : dst.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada yang tersebut di bawah ini, nomor urut: 17  
Nama : **SUAEB MAHBUB**  
Jenis Penghargaan : Pemuda Pelopor  
Prestasi : Mendirikan Kelompok Nelayan JASEBA Pantai Marunda sebagai wadah komunikasi dan kelompok usaha bersama masyarakat pesisir dan nelayan
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2009

**Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,**

ttd

**Dr. Andi A. Mallarangeng**

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,





**LAMPIRAN 2**

**PERMOHONAN PEMBINAAN SEBAGAI SOLUSI ATAS KERUGIAN YANG  
DIDERITA KIBAT PERDA NO.08 TAHUN 2007**

Nomor : 04/ JASEBA/ II/ 10  
Lampiran : 1 Set  
Perihal : **Permohonan Pembinaan**

Kepada Yth,  
Bapak **DR. Eng. Fauzi Bowo**  
**Gubernur DKI Jakarta**  
Up. Yth. Bapak drh. **Edi Setiarto**  
**Kepala Dinas Perikanan dan**  
**Pertanian DKI Jakarta**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga senantiasa memberikan curahan rahmat dan inayah kepada kita semua. Amin.

Bersama ini kami dari Komunitas Nelayan Tradisional Marunda, berkirin surat kepada Bapak, kami mohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat membaca surat kami, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam surat ini yaitu :

1. Kami mewakili teman-teman dari Komunitas Nelayan Tradisional Marunda, pada hakekatnya adalah patuh dan taat pada peraturan daerah maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan perikanan dan kelautan, meskipun kami harus merasa kehilangan lokasi kegiatan, asset dan alat tangkap. Kami telah menyadari bahwa lokasi kegiatan kami pada saat ini akan dipergunakan untuk kawasan wisata pantai publik dan kawasan ekonomi khusus, maka kami harus memulai berbenah diri untuk menyesuaikan agar kegiatan kami tidak berbenturan dengan kepentingan yang menjadi program pemerintah.
2. Layaknya anak terhadap orang tua kami berkeluh kesah kepada Bapak yang kami anggap sebagai Bapak dari pada komunitas

masyarakat perikanan bahwa kami masih ingin berkarya melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pengolah hasil perikanan (terasi udang rebon cap Mangrove – SP-1RT NO 2023175011 52. Binaan Sudin P2KP Jakarta Utara). Kegiatan tersebut sangat mendukung program 2 Destansi jalur wisata yang ada di Kelurahan Marunda, yaitu rumah singgah Si Pitung dan Masjid Al-Alam yang memiliki nilai kharismatik sejarah dan budaya. Sehingga ribuan pengunjung dapat menikmati oleh-oleh dari Marunda. Kami kehilangan tempat produksi terasi udang rebon, kami kehilangan tempat budidaya ikan kerapu dan bandeng di Keramba Apung. Kami kehilangan lokasi penangkapan ikan dan kami kehilangan alat penangkapan yaitu berupa sero. Semua itu yang kami alami, kami tidak rapuh akan tetapi kami tetap akan berkarya sesuai dengan harapan kami mempertahankan prestasi DKI Jakarta sebagai prestasi terbaik Nasional Bidang Kebaharian.

3. Kerugian usaha yang kami alami yang terkena Perda No. 08 Tahun 2007.

a. Keramba Jaring Apung	senilai	Rp. 35.000.000,-
b. Ikan Bandeng 2000 ekor	senilai	Rp. 7.000.000,-
Jumlah Kerugian		Rp. 42.000.000,-

4. Tujuan kami kedepan adalah merubah system penangkapan yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Aset-aset yang masih kami miliki sekarang adalah :

4.1. Kelompok pengolah

Aset yang dimiliki :

- Legalitas produksi (SP. IRT)
- Mesin produksi

Sarana yang dibutuhkan :

- Tempat produksi

#### 4.2. Kelompok budidaya keramba jaring apung

Aset yang dimiliki :

Sertifikat budidaya perikanan laut dan tehnik-tehnik budidaya dari balai besar riset perikanan laut Gondol Bali program pelatihan oleh Sudin P2KP Jakarta Utara.

Sarana yang dibutuhkan :

Keramba jaring apung. Sarana yang dimiliki sekarang hancur terkena penertiban Perda No. 08 Tahun 2007.

#### 4.3. Kelompok nelayan tradisional

Aset yang dimiliki :

- Legalitas yaitu berupa ANKAPIN III (Ahli Nautika Kapal Perikanan) hasil pelatihan di BBPPI Semarang, oleh Dinas Perikanan dan Pertanian DKI Jakarta.
- Kapal motor dan surat-surat yaitu berupa TDPKP, SIPI dan PAS KAPAL.

Sarana yang dibutuhkan :

- Alat bantu penangkapan  
Sonar, Pushonder, Radar, Kompas, GPS
- Alat penangkapan  
Jaring rampus millennium
- Tambatan kapal (Jetty) untuk bertambat labuh

#### 5. Kesimpulan

Daerah pesisir adalah tidak terlepas dari pada kehidupan nelayan, maka kami sebagai masyarakat pesisir tidak mudah untuk merubah pola hidup beralih profesi kepada kegiatan lain, namun kami berharap kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian DKI Jakarta kiranya dapat berkenan membantu kami, sebagai warga masyarakat perikanan yang amat menghargai suatu kebijakan kepentingan pemerintah.

Pengajuan sarana-sarana yang kami butuhkan adalah :

1. Tempat produksi bagi pengolah terasi udang rebon Mina Marunda Mandiri Cap Mangrove
2. Keramba jaring apung untuk budidaya ikan kerapu dan bandeng
3. Alat bantu penangkapan dan alat tangkap untuk nelayan tradisional yaitu sonar, Pushonder, Radar, Kompas, GPS dan jaring rampus millennium.

Maka dengan adanya kebutuhan tersebut diatas terpenuhi, maka kami merubah paradigma baru dari nelayan tradisional menjadi nelayan moderen.

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon kiranya Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas berkenan dan mengabulkan permohonan kami. Semoga Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Atas bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Jakarta, 18 Januari 2010

Hormat Kami

**Ketua Kelompok Nelayan Jaseba Pantai  
Marunda (Pemuda Pelopor Nasional Bidang  
Kebaharian DKI Jakarta)**

  
**SUAEB MAHBUB**

*Tembusan :*

*Yth. Bapak Kasudin P2KP Jakarta Utara*

### **Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda**

Marunda Beach, which stretches about 1.7 kilometers in Cilincing, North Jakarta and just 10 kilometers from our site, is just only one of public beach left in the capital city of Jakarta. In this area, the historical 'Si Pitung House' was built in the early days of the 20<sup>th</sup> century during the Dutch occupation from the former *Batavia*. It is a house dominated by wooden frame built. Residents of the coastal side are fishermen with total 600 families with daily income of less than EUR 7 per family. This community is one of the poorest communities in Jakarta which more or less is also affected by the country's economic crisis. Inadequate family health, child education, personal hygiene and sanitation facilities are part of their daily lives. School buildings are of poor condition, clean water is limited, most cabins/small houses are built just from plywood with clay as their floor and most of them do not have private latrine, roads are full of mud during rainy days and fishy smell is everywhere. In such an environment, there is a high risk of disease.

Looking back at previous CP experiences, this situation can not be approached through 'one shot' program. It needs an integrated and sustainable program to improve social-economic condition of the people.

*Hence, Sustainable Community Development for Fishermen Families in Marunda*, that is how we named our 5<sup>th</sup> community project, involved almost all employees of Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia. From female staff of Finance until Production Operator, from the Office Boy until the President Director lent their hands in any of the activities during regular visits to the location: painting the schools, restoring muddy public road with paving block, fun game with the children, setting up public library and early childhood education program, planting the trees, cleaning up, etc.

The program was assisted by Bogor Agricultural University (IPB – Institut Pertanian Bogor) Along with that, support from the Government agencies have also been received, making this CP this time unique where all related parties in term of community development are involved: government, education institution, private sector and the community itself

The kick-off program on August 30, 2008 was attended by Vice Head of Municipality of North Jakarta and officially opened by our President Director, Sri Aditia.

The program was divided into 3 parts to develop this community from August 2008 until December 2008.

The first part is "Empowerment" involved Akzo Nobel employees and IPB, an internationally reputable institute for agricultural and fishery sciences. The objective of the first part is to build a direct contact with local fishermen to help them improve their fishing knowledge. A focus group discussion was first held to find out what problems they were facing. At the next stage, a fishery management training was conducted by IPB under facilitation of AkzoNobel

employees to give the fishermen adequate knowledge related to their job. Empowerment for intensification and extensiveness of fishing technology was also undergone including donation of adequate fishing equipments. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia also facilitated the form of an independent fishing enterprise owned by the local fishermen community as media to work together for fishing activists.

The second part is "Environment and Public Facilities improvement" is designed to restore their socio-economic condition through physical activities. Akzo Nobel employees, divided in groups, went to the location every week to lend their hands for the unfortunate community. A small quay from concrete was also built on Marunda beach which will hopefully attract more people to visit this historical place, which in the end will bring additional income to the families. Sunshine and rain did not reduce the employees' spirit to do the jobs as it can be seen from their happy faces. The employees had working side by side with local residents, with enthusiasm, to repaint school buildings and form a public library. During the overall program, 200 trees were planted along the housing area. Each employee planted one tree which made the area brighter and greener. Female employees taught the children in a very simple classroom yet gave the children happy moment. Several books, some teaching aids and furniture were donated to support their teaching activities.

On the closing of the program, our full team went to the location to do our final program in restoring road facility with paving block. Heavy rain and muddy road could not stop the employees to hand-in-hand do the job, so now the people do not need to walk on muddy road on rainy days anymore. The closing ceremony on December 20, 2008 was attended by an official from North Jakarta's Fishery, Marine and Veterinary Agency.

Maslina, one of female employee volunteer said, " *From this project I learned that there are still many people who live beyond what I have ever thought. I could never imagine that they could survive in such a life with limited clean water, limited food, muddy road and dirty environment. I hope that they will be able to utilize the knowledge and facilities which supported by the AkzoNobel Community Program to improve their lives.*"

Then, our counter part from the Marunda community, Mr. Suaeb Mahbub has been awarded as the Young Volunteer on Nautical Matters 2009 in Jakarta Province. He also achieved the 3<sup>rd</sup> place in the 2009 National Young Volunteer Award on Nautical Matters. He gets the national recognition for his success to develop his community; starting as a low income fisherman, he acted as our (a private sector) and governmental institution counter part for coordinating the community to improve their skills, and utilizing properly the fund and our employee involvement to develop the community area (pedestrian ways, children education facilities, jetty, more threes in the area, etc.), then he coordinated the fishermen community there under the Koperasi Mina Marunda organization (now he is the head of the Koperasi organization). The Koperasi manages the fund to be the working capital for the poor fishermen so they can borrow the working capital before going to do fishing in the sea and pay back the loan right after the fishing activities. The Koperasi also builds a kind of floating unit as a logistics stocking points for the fishermen so during fishing activities they don't need to come back to their house for small things needed for further fishing, and they have improved the quality of the community products, among others terasi (fermented shrimps), so they can sell to modern stores, etc.

*Picture*



The environment – the most challenging community program, full of mud during rainy days and fishy smell is everywhere.



Trees planting- for a better environment





Training session – Empowerment for intensification and extensiveness of fishing technology, attended also by housewives whose also a key player to support family income.



Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia also facilitated the form of an independent fishing enterprise owned by the local fishermen community as media to work together for fishing activists

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK JULIANSYAH DAN BAPAK SRI ADITIA  
BERITA ACARA WAWANCARA**

**Wawancara dilakukan dengan**

**1. Nama : Sri Aditia (A)**

**Jabatan : President Director PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia**

**Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni 2010**

**Lokasi : Kantor Pusat PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia**

**2. Nama : Juliansyah (J)**

**Jabatan : Quality, Health, Safety, & Environment Manager**

**Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2010**

**Lokasi : Kantor Pusat PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia**

**Materi wawancara:**

1. Aktivitas CSR yang dilakukan oleh ANCRI, terutama pada aktivitas *Sustainability Community Development for Fisherman Family in Merunda*. (nomor 1 – 25)
2. Kesesuaian aktivitas CSR di ANCRI dengan program MDG (*MilleniumDevelopment Goals*) yang sedang digalakkan oleh pemerintah. (nomor 26 & 27)
3. Pelaporan CSR yang dibuat oleh ANCRI pada periode waktu pelaksanaan aktivitas CSR. (nomor 28-32)
- 4.

**Pertanyaan:**

1. Menurut anda apakah CSR merupakan pilihan atau kewajiban?

**A:** Pilihan jika berbentuk *community development*, kewajiban jika bentuk usaha tertentu (misalnya pertambangan). Untuk *industrial product* hal tersebut sebaiknya menjadi pilihan, sebab *scoop of work* yang dapat dilakukan terbatas.

**J:** Pilihan, karena jika diharuskan (kewajiban) maka akan ada unsur keterpaksaan di dalam pelaksanaannya.

2. Apakah aktivitas CSR harus terkait dengan bisnis inti perusahaan?

**A:** Tidak, karena jika terkait dengan bisnis inti perusahaan, maka *scoop of work* akan sangat terbatas.

**J:** Tidak, karean pada dasarnya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Jika terkait, maka akan ada unsur pamrih dan

keterikatan yang mungkin kurang menguntungkan bagi salah satu pihak dan akan ada benturan dengan *code of conduct* sehingga muncul *conflict of interest*.

3. Dalam merancang program CSR, dari mana kita mesti berangkat? Kemampuan perusahaan atau kebutuhan masyarakat?

**A:** Kemampuan perusahaan.

**J:** Saling terkait satu sama lain. Perusahaan harus menyadari kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kemampuan yang dimilikinya.

4. Begitu banyak persoalan masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan; mulai dari pengangguran, anak telantar, sampai ketiadaan air bersih. Apa yang harus dilakukan? Ikut terlibat pada semua persoalan atau memilih satu bidang saja?

**A:** Untuk efektifitas, sebaiknya fokus. Akan tetapi jika saling terkait, lakukan apa yang bisa dilakukan semaksimal mungkin dengan tujuan membantu masyarakat dan lingkungan semaksimal mungkin.

**J:** Dilihat kebutuhan *comprehensive* masyarakat karena ada keterkaitan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya. Akan tetapi kebutuhan ekonomi lebih dikedepankan.

5. Lalu, bagaimana menentukan prioritas program?

**A:** Seberapa banyak masyarakat yang bisa terbantu.

**J:** Program dapat dilakukan dengan meingikutsertakan para karyawan (SDM), fasilitas, dan tidak ada *conflict of interest*, dana yang dibutuhkan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

6. Apa saja prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan CSR?

**A:** Tidak dijadikan *publicity stunt* dan kemungkinan keikutsertaan masyarakat Akzo Nobel secara maksimal.

**J:** Optimalisasi SDM, tidak adanya *conflict of interest*, dan segala bentuk aktivitas yang dilakukan diharapkan akan menciptakan taraf hidup masyarakat dan lingkungan yang lebih baik.

7. Apa tujuan awal (umum) pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh ANCRI? Apakah tercapai?

**A:** 4P (*People, Planet, Profit, Pride*), meningkatkan taraf hidup masyarakat, opini yang baik di mata masyarakat.

Ya, sejauh ini sudah tercapai.

**J:** Mengajak karyawan untuk lebih mencintai dan sensitif dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta menjalin kedekatan personal antar pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas CSR tersebut.

Ya, sudah sesuai dengan harapan.

8. Apakah ada tujuan spesifik dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas CSR ANCRI? Apakah tercapai?

**A:** Optimalisasi dana dari Akzo Nobel Global di Indonesia sehingga di masa yang akan datang dana yang dialirkan akan lebih besar dan dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dan lingkungan Indonesia yang lebih luas.

**J:** 4P, yakni *People* (adanya keterlibatan dan munculnya rasa tanggung jawab individu terhadap masyarakat sekitarnya), *Planet* (adanya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan), *Profit* (secara tidak langsung akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut sehingga akan terbentuk citra positif yang menghasilkan keuntungan), *Pride* (rasa bangga karena memiliki andil untuk melakukan hal yang positif). Sejauh ini sudah tercapai.

9. Apa ada kriteria tertentu bagi ANCRI untuk memutuskan untuk melakukan sebuah aktivitas CSR?

**A:** Keseragaman aktivitas masyarakat di lingkungan aktivitas CSR, adanya sumber daya dan tenaga ahli, adanya keterlibatan karyawan.

**J:** Aspek legalitas di lingkungan yang menjadi sasaran aktivitas CSR, kondisi masyarakat dan lingkungan, jarak (keterlibatan karyawan Akzo Nobel seoptimal mungkin).

10. Apakah CSR adalah kegiatan *public relation*?

**A:** Secara tidak langsung, Ya.

**J:** Seharusnya tidak karena berarti ada *conflict of interest*.

11. Apakah CSR membutuhkan dana besar?

**A:** Realitif.

**J:** Tidak (relatif), tetapi lebih mengepankan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan lingkungan dengan apa yang dimiliki. Besarnya biaya biasanya dikarenakan adanya keterlibatan pihak ke-3.

12. Apa ada rencana jangka panjang terhadap aktivitas CSR yang dilakukan?

**A:** Kompetisi antar Akzo Nobel di Indonesia untuk melakukan *good things* dan mengharapkan adanya mitra untuk melakukan aktivitas CSR.

**J:** Aktivitas CSR dapat dilakukan dengan lebih terorganisir dengan sasaran yang lebih luas, misalnya dengan cara pembentukan PAN Akzo Nobel Indonesia dalam bentuk yayasan dan membantu pemerintah memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas melalui aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan.

13. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh ANCRI di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas CSR selama ini?

**A:** Perumusan program yang sesuai dengan kondisi perusahaan, birokrasi yang rumit, dan sulit mencari mitra yang sejalan dengan harapan Akzo Nobel.

**J:** Birokrasi yang rumit, adanya *conflict of interest* antara instansi yang terlibat, masyarakat cenderung mengharap sumbangan bukan bantuan.

14. Bagaimana cara ANCRI mengatasi kendala-kendala tersebut?

**A:** Jika terlalu sulit, tinggalkan; jika masih ada jalan, lakukan semaksimal mungkin.



**J:** Fokus dan mencari informasi dari pihak-pihak yang benar-benar berkompetensi dan melakukan *survey* secara mendetail untuk untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh lingkungan dan masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas CSR.

**15.** Apakah CSR harus bersifat *top-down* (berdasarkan survey terlebih dahulu) atau bisa *bottom-up* (permintaan dari *beneficiaries*)?

**A:** *top-down*.

**J:** Partisipatif (saling terkait).

**16.** Apakah yang menyebabkan pihak ANCRI memutuskan untuk CSR berupa *community development* di Merunda?

**A:** Jarak tempuh memungkinkan keikutsertaan mayoritas masyarakat Akzo Nobel, legalitas kependudukan yang jelas, dan keseragaman aktivitas masyarakat.

**J:** Sorotan publik terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut, aspek legalitas yang jelas, kebutuhan masyarakat dan lingkungan, aspek historis.

**17.** Dari mana datangnya ide awal pelaksanaan CSR di Merunda?

**A:** Karyawan.

**J:** Karyawan.

18. Alasan apa yang membuat Merunda menjadi pilihan untuk melaksanakan aktivitas CSR?

**A:** Aspek legalitas dan kebutuhan masyarakat.

**J:** Aspek legalitas yang jelas dan kebutuhan masyarakat, serta potensi lingkungan yang ada.

19. Apa tujuan awal pengadaan aktivitas CSR berupa *community development* di Merunda?

**A:** Adanya kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang sejalan dengan kemampuan yang dimiliki.

**J:** Melakukan aktivitas CSR yang *sustainable* dan terintegrasi dengan efek yang bersifat jangka panjang.

20. Aspek apa yang cenderung mendasari aktivitas CSR di Merunda (keterlibatan dalam komunitas, pembuatan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, atau *employee relations*?)

**A:** Keterlibatan dalam komunitas.

**J:** Keterlibatan dalam komunitas.

21. Bagaimana sistematika pertahapan (pelaksanaan) aktivitas CSR di Merunda secara spesifik?

**A:** *Survey* dan bertemu dengan pimpinan masyarakat serta pejabat terkait, mengevaluasi kebutuhan masyarakat dan lingkungan, penyesuaian dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan.

**J:** Tahap perencanaan dengan melakukan *fit and proper test* serta *survey* di wilayah yang bersangkutan; Tahap implementasi dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya; Tahap evaluasi dengan terus *me-maintain* perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan; Pelaporan atas hasil aktivitas ke Akzo Nobel Global.

22. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaannya?

**A:** Tidak ada pemimpin yang sesungguhnya di lokasi tersebut.

**J:** Sulitnya menanamkan pola pikir positif dan jiwa kewirausahaan, sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk ikut andil dan bekerjasama membangun lingkungannya, dan sulit melakukan pendekatan ke masyarakat.

23. Sejauh ini, apa yang dilakukan ANCRI untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

**A:** Mencari jalan keluar bersama masyarakat sehingga pada akhirnya salah seorang dari mereka dipercayai untuk mengkoordinasi masyarakat sekitar.

**J:** Melakukan adaptasi agar lebih mudah untuk memahami dan mambaur ke masyarakat, melakukan pendampingan sekitar 6 bulan untuk melakukan pengawasan dan TOT (*Trainer of Trainer*), dan melakukan evaluasi program secara berkala.

**24.** Sejauh ini, manfaat apa yang dirasakan oleh ANCRI selama melaksanakan aktivitas CSR di Merunda?

**A:** *happy employee, good memory*, kesadaran kepedualian terhadap lingkungan sekitar.

**J:** Secara internal, solidaritas dan kedekatan masyarakat Akzo Nobel semakin kuat dan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan semakin baik. Secara eksternal terbentuknya citra positif yang lebih baik terhadap Akzo Nobel terutama dengan terpilihnya salah satu tokoh masyarakat Merunda menjadi pemenang Pemuda Pelopor tahun 2009.

**25.** Apa harapan jangka panjang ANCRI terhadap program CSR di Merunda ini baik bagi perusahaan maupun masyarakat serta lingkungan di Merunda? Apakah ada rencana-rencana lebih lanjut mengenai aktivitas CSR ini?

**A:** Masyarakat akan menjadi lebih mandiri dan adanya perbaikan taraf hidup.

**J:** *Me-maintain* dan terus memantau hasil aktivitas yang telah dilaksanakan sehingga harapan akan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat dan lingkungan

## LANJUTAN

terus meningkat. Jika masyarakat Merunda membutuhkan bantuan, pihak Akzo Nobel tidak berkeberatan untuk kembali terjun secara langsung untuk membantu.

**26.** Apakah aktivitas CSR yang dilaksanakan oleh ANCRI terkait dan didasari oleh program MDG?

**J:** Secara tidak langsung, Ya.

**27.** Terkait dengan pertanyaan no. (26):

Jika: Ya, tolong dijelaskan tujuan-tujuan, alasan-alasan, dan harapan-harapannya.

Jika: Tidak, tolong dijelaskan alasan-alasannya dan apakah ada tujuan jangka panjang yang mengarah ke program MDG di masa yang akan datang?

**J:** Cakupan yang mampu memenuhi hampir seluruh aspek kehidupan dan *goodwill* yang akan meningkatkan nilai perusahaan pada akhirnya.

**28.** Apakah evaluasi mengenai segala bentuk aktivitas dan pelaporan CSR dilakukan secara rutin?

**A:** Ya, dua sampai tiga kali per tahun.

**J:** Ya, *quarterly*. Terutama setelah melakukan suatu aktivitas CSR dan dilaporkan ke Akzo Nobel Global untuk di konsolidasikan.

**29.** Apakah pihak ANCRI membuat laporan CSR secara rutin?

**A:** Tidak.

**J:** Tidak, karena belum dibutuhkan. Laporan CSR dibuat oleh Akzo Nobel Global.

**30. Jika: Ya, apa tujuannya?**

**Jika:** Tidak, mengapa?

**A:** Belum dibutuhkan.

**J:** Segala bentuk aktivitas yang dilakukan dilaporkan langsung ke Akzo Nobel Global untuk dikonsolidasikan.

**31. Apa saja indikator keberhasilan CSR?**

**A:** Sesuai anggaran, rencana, dan ada keterlibatan karyawan.

**J:** Pencapaian target yang diharapkan, hasil yang optimal, keterlibatan masyarakat Akzo Nobel secara penuh.

**32. Apakah ada standarisasi tertentu yang diikuti oleh ANCRI di dalam pembuatan laporan CSR (misalnya GRI)?**

**J:** Tidak.



**LAMPIRAN 5**

**AKZO NOBEL POLICY ON AUDITOR INDEPENDENCE SERVICES TO BE  
PROVIDED BY THE EXTERNAL AUDITORS**

## **AkzoNobel Policy on Auditor Independence Services to be provided by the External Auditors**

Adapted on December 6, 2007 by the Audit Committee

### **Purpose**

The purpose of this policy is

- to provide a framework for decision-making on which services the External Auditor is entitled and not entitled to provide and
- to establish the role and responsibilities of the Audit Committee in this process.

### **Policy**

AkzoNobel, including its majority owned legal entities, will only use the appointed external auditor to provide services (other than the audit services outlined below), in cases where these services do not conflict with the auditor's independence.

### **Policy Guidance**

As a general guidance, the policy requires the external auditor of AkzoNobel to be independent in accordance with

- the Dutch regulations as revised by The Dutch Royal Institute of Registered Accountants, the Royal NIVRA, in January 2007,
- the European Commission Recommendation on Statutory Auditor's Independence in the EU (issued May 2002).

These rules are based on the principle that an auditor must be independent of the audit client, both in fact and in appearance.

As a consequence the external auditor is not independent if he/she, directly or indirectly, maintains a financial, employment or business relationship with AkzoNobel or provides a service which:

- creates a mutuality of interest;
- places the auditor in a position to audit his/her own work;
- results in the auditor acting as a AkzoNobel manager or AkzoNobel employee or
- puts the auditor in the role of advocate for AkzoNobel.

### **Role of Audit Committee**

The Audit Committee, part of the Supervisory Board, is responsible for ensuring the external auditor's independence.

Therefore the Audit Committee is involved in the decision process on the selection and appointment of the external auditor, as well as on the compensation for audit and audit related services. Furthermore, the Audit Committee pre-approves audit – and permitted non-audit services in line with this Policy.

Annually, the independence of the external auditor will be reviewed.

Any unresolved disputes between the Board of Management and the external auditor will be brought to the attention of the Audit Committee.

Version 3, December 2007





## Services Provided by External Auditor

In addition to audit services, AkzoNobel's external auditors are able to provide audit related and non-audit services as specified below. The list of audit related and non-audit services as well as the related conditions (tender or specific approval by the Audit Committee) is annually (pre-) approved by the Audit Committee. The external auditor can never provide the prohibited services.

### Audit services

Audit services are:

- a) Issuing the audit opinion for AkzoNobel's Group reporting purposes and on Akzo Nobel's consolidated financial statements. This service includes the review of internal accounting and financial reporting controls;
- b) Issuing the audit opinion on the statutory financial statements of the holding company and of its subsidiaries, where legally required;
- c) Issuing review opinions on interim financial statements;

The external auditor is appointed to perform the above services and does not need to go through a tender process for each engagement.

### Audit related services

Audit related services are other work traditionally provided to AkzoNobel by the external auditor in his capacity as external auditor. They usually result in a certification or specific opinion on an investigation.

These related audit services include:

- a) Opinions/ audit reports on other information provided by the company upon a request from a third party (e.g. a prospectus, comfort letters, royalty audits, or a report on employee benefit plans);
- b) Opening balance sheet audits of acquisitions;
- c) Closing balance sheet audits of disposals;
- d) Advice on accounting policies;
- e) Due diligence investigations (except for vendor initiated investigations);
- f) Special purpose IT audits or IT auditors' review of set up of IT systems;
- g) Internal audit services but subject to restrictions as mentioned in prohibited services below.

The Audit Committee should pre-approve the engagement of the external auditor for all of these services.

For services under b) through f), if the services are relied upon for the audit of Akzo Nobel nv, then they will be classified as audit services. For services under a) through d) the external auditor can be engaged to perform services without the requirement to have a tender process. For e), f) and g) in principle a tender process is required if the work is anticipated to generate fees of above € 250,000.



### Non-audit services

These services include:

- a) Tax compliance work;
- b) Tax consulting services, including tax planning, but **excluding**
  - representation in (tax) courts)
  - services relating to tax transactions under conditions of confidentiality;
  - recommending aggressive tax position transactions;
  - tax services to certain persons serving in financial reporting oversight roles.
- c) Treasury advisory services;
- d) E- commerce advisory;
- e) Corporate finance advisory
- f) Risk management and internal control projects
- g) Forensic audits, but these are prohibited when the auditor will be involved in subsequent legal procedures;
- h) Consultancy (all other non-audit services)

For all these services, the Audit Committee should pre-approve the engagement of the external auditor.

For all these services, in principle a tender process is required for work anticipated to generate fees of above € 250,000 and if above € 500,000 specific approval of the Audit Committee is required. In any event, the total annual fee for non-audit services by the external auditor shall not exceed the sum of the annual fees for audit and audit related services.

### Prohibited services that cannot be provided by the external auditor

The external auditor **cannot** provide the following categories of services:

- a) Appraisal or valuation services, fairness opinions or “contribution in kind” reports; There are two exceptions:
  - unless performed in context of planning and implementation of a tax planning strategy for tax compliance services;
  - unless performed solely for non-financial purposes where the results of the valuation do not affect the financial statements and the resulting report will not be included in any public filing or record;
- b) Internal audit outsourcing services that relate to the internal accounting controls, financial systems or financial statements;
- c) Financial information systems design and implementation;
- d) Any bookkeeping or other services related to the accounting records or financial statements. There are exceptions: Unless the results of such service are not to be subject to audit procedures or unless the financial statements prepared are not related to a direct filing with Dutch authorities or do not form the basis of the financial statements filed with the Dutch authorities (i.e. statutory financial statements for small legal entities).
- e) Payroll services;
- f) Management functions, i.e. acting temporarily or permanently as a director, officer, or employee or performing any decision making, supervisory or ongoing monitoring functions. This includes outsourced services and loaned staff;
- g) Executive recruiting and human resources services;
- h) Broker or dealer, investment adviser or investment banking services;



- i) Actuarial services, except for assistance in understanding methods, models, assumptions and inputs used in the calculation of the provision. Defined contribution plan allocation services are specifically prohibited;
- j) Legal services and other expert services unrelated to audit for the purpose of advocating AkzoNobel's interests;
- k) Tax consultancy services specifically related to
  - representation in (tax) courts)
  - services relating to tax transactions under conditions of confidentiality;
  - recommending aggressive tax position transactions;
  - tax services to certain persons serving in financial reporting oversight roles
- l) Corporate Secretarial Services;
- m) Certain forecasts and projection services;
- n) Market research studies, unless limited to gathering or analyzing market data;
- o) Any other service that the AkzoNobel Board of Management determines by regulation is not permissible.

For more details on the above services reference is made to the Dutch Royal Institute of Registered Accountants, and the guidance provided by the European Commission.

For clarification whether requested services of the external auditor fall under the above categories, you should contact the Director Internal Audit

### **Audit Committee Pre-approval of services**

For particular services, the Audit Committee will establish pre-approval policies and procedures. The approval responsibilities will not be delegated to management and the procedure will provide for timely information on each service to the Audit Committee. The Audit Committee will be informed on a quarterly basis of all non- audit services provided by the external auditor.

### **Rotation of Audit Partners**

AkzoNobel requires its external auditor to provide an appropriate balance between going concern (effectiveness and efficiency, e.g. audit costs), risk management, independence and credibility. Rotation of the lead (signing) and concurring (review) partner of the AkzoNobel audit is required after a maximum period seven (7) years from their appointment date into this position. None of these partners may rotate to a different position within the AkzoNobel audit team within a period of two years.

Other key audit partners, either at the AkzoNobel Group level or partners signing off audit opinions of material AkzoNobel entities are required to rotate from their position after a maximum period of seven years. None of these key audit partners may rotate to a different position within the AkzoNobel audit team within a period of two years.



## **Appointment of Auditor**

The appointment of the external auditor will be an indefinite appointment with a review every four (4) years by the Audit Committee to assess the services against measurable criteria laid down in a formal service level agreement.

The Audit Committee will advise the Supervisory Board, who will communicate to the Annual General meeting of Shareholders the results of this assessment. In case the Supervisory Board proposes not to reappoint the existing external auditor, a tender process will be started to select a new external auditor. The next review communication will take place in the Annual Shareholders meeting for the fiscal year 2007.

## **Responsibility of the External Auditor**

The external auditor will maintain a quality control system that provides reasonable assurance that its independence will not be impaired. The external auditor will report annually to the Audit Committee on all aspects concerning independence, including possible conflicts with this policy, if any. The external auditor will annually confirm its independence in writing. The external auditor will ensure that his firm will be registered at the Autoriteit Financiële Markt (AFM) in due time. Any changes in this registration will be reported immediately in writing to the Audit Committee.

## **Hiring arrangements**

AkzoNobel and the external auditor agree on a restricted hiring policy:

- AkzoNobel will not hire partners and professional employees of the external auditor involved in the AkzoNobel audit within the last two (2) years, unless they have provided less than ten hours of actual service;
- The external auditor will not hire senior Management from AkzoNobel for involvement in the AkzoNobel audit within two (2) years after termination of their employment with AkzoNobel.

## **Responsibility of Audit Committee**

Each year the Audit Committee will formally review the external auditor's independence as required by the Audit Committee Charter and document its position in this matter. It will address any changes to this Policy or situation as needed. Any independence issues or conflicts of interests will be communicated immediately to the SEC-AFM, other exchange commissions as required and any other regulatory body.

## **Communication**

AkzoNobel will communicate its policy on auditor's independence to stakeholders.

## **Date of effectiveness**

This policy was effective from May 6, 2003 onwards and adapted on 13 June 2007 and 6 December 2007.

Version 3, December 2007

**LAMPIRAN 6**  
**AKZO NOBEL SAAT INI**



**Sampah yang Masih Memenuhi Piggir Jalan Perkampungan Nelayan**



**Koperasi Mina Marunda**



**Jalan yang Telah Dipasangi *Paving Block***



**Kerajinan Tangan Masyarakat Marunda yang Dilakukan Guna Mengatasi Masa Paceklik**